

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
TAHUN 2020**



**KECAMATAN SANANWETAN
KOTA BLITAR
JI. KALIMANTAN NO. 36 KOTA BLITAR
TAHUN 2020**

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya dengan rahmat dan pertolongan-NYA lah penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Sananwetan Kota Blitar Tahun 2020 dapat diselesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun atas amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan, sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta menciptakan Good Governance dan Clean Government. Dokumen LKjIP secara garis besar menyajikan informasi mengenai gambaran organisasi Kecamatan Sananwetan Kota Blitar, dokumen perencanaan dan kinerja seperti Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), serta Penetapan Kinerja.

Pencapaian kinerja Kecamatan Sananwetan Kota Blitar merupakan hasil kerja sama dan kerja keras dari berbagai pihak. Akhir kata semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Sananwetan Kota Blitar tahun 2020 ini bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2020 dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Blitar, 31 Januari 2021



HERU EKO PRAMONO, S.STP.

Pembina Tk. I

NIP. 19750409 199602 1 002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Kecamatan Sananwetan merupakan unsur perangkat daerah yang bertugas membantu kepala daerah dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan. Camat memperoleh pelimpahan sebagian kewenangan Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2016-2021 yang di dalamnya memuat Visi dan Misi Pemerintah Kota Blitar, Kecamatan Sananwetan mengemban misi Pemerintah Kota Blitar yang ke-6 yaitu: “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Profesional”. Misi ke-6 tersebut mempunyai tujuan “Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Sesuai dengan Prinsip-Prinsip Kepemerintahan yang Baik”.

Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, ditetapkanlah dua poin sasaran yang merupakan kinerja utama dari Kecamatan Sananwetan yang harus dicapai sesuai target. Dua sasaran tersebut adalah:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan untuk kepuasan masyarakat.
2. Meningkatnya koordinasi di bidang pemerintahan dan pembangunan di wilayah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerinah Kecamatan Sananwetan Kota Blitar merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja utama yang dalam pelaksanaannya dijabarkan dalam program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama satu tahun anggaran oleh seluruh seksi dan bagian di kecamatan dan tujuh kelurahan yang ada di dalam wilayah Kecamatan Sananwetan. Pada Tahun Anggaran 2020 Kecamatan Sanawetan dan tujuh kelurahan yang ada di dalam wilayah Kecamatan Sananwetan mengelola dana APBD sebesar Rp. 20.862.853.330 yang terdiri atas anggaran untuk belanja tidak langsung sebesar Rp. 7.574.355.485,00 dan belanja langsung sebesar Rp. 13.288.497.845,00. Dari keseluruhan dana tersebut yang dapat direalisasikan sebesar Rp. 20.979.818.936,50.

Program yang dilaksanakan dengan mengelola dana tersebut terdiri dari 5 program, yaitu:

1. Program Pelayanan Perkantoran
2. Program Peningkatan Kapasitas Perangkat Daerah
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
4. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan Dan Kelurahan

5. Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Dan Pembangunan

Dengan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Sananwetan Tahun Anggaran 2020 yang tercapai sesuai target yang ditetapkan, tercapai pula target capaian indikator pengukuran kinerja utama sesuai dengan yang ditetapkan. Untuk kinerja utama yang pertama tercapai persentase masyarakat yang puas terhadap pelayanan Kecamatan Sananwetan sebesar 95% dan untuk kinerja utama yang kedua tercapai persentase jumlah koordinasi di bidang pemerintahan / keamanan / ketertiban/kesejahteraan sosial / pembangunan di wilayah yang ditindaklanjuti sebesar 100%.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI.....	2
C. MAKSUD DAN TUJUAN	7
D. DASAR HUKUM	8
E. ASPEK-ASPEK STRATEGIS	9
F. ISU-ISU STRATEGIS	10
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	11
A. RENCANA STRATEGIS	11
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	15
A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA/ SASARAN	15
1. ANALISIS CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN TARGET DAN REALISASI TAHUN 2020	17
2. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2019 – 2020	22
3. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA S.D AKHIR PERIODE RENSTRA	24
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN (COST PER OUTCOME).....	22
1. ALOKASI PER SASARAN PEMBANGUNAN	40
2. PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN	40
3. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA	41
C. PRESTASI/ PENGHARGAAN	42
BAB IV PENUTUP	43
A. KESIMPULAN	43
B. LANGKAH PERBAIKAN	43
LAMPIRAN – LAMPIRAN	
1. Rencana Strategis OPD Tahun 2016-2021 (terbaru)	
2. Rencana Kinerja Tahun 2020	

3. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2020
4. Pengukuran Kinerja Tahun 2020

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dinyatakan bahwa Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Sesuai pasal 5 huruf e Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 disebutkan bahwa pelaporan kinerja merupakan salah satu unsur penyelenggaraan SAKIP.

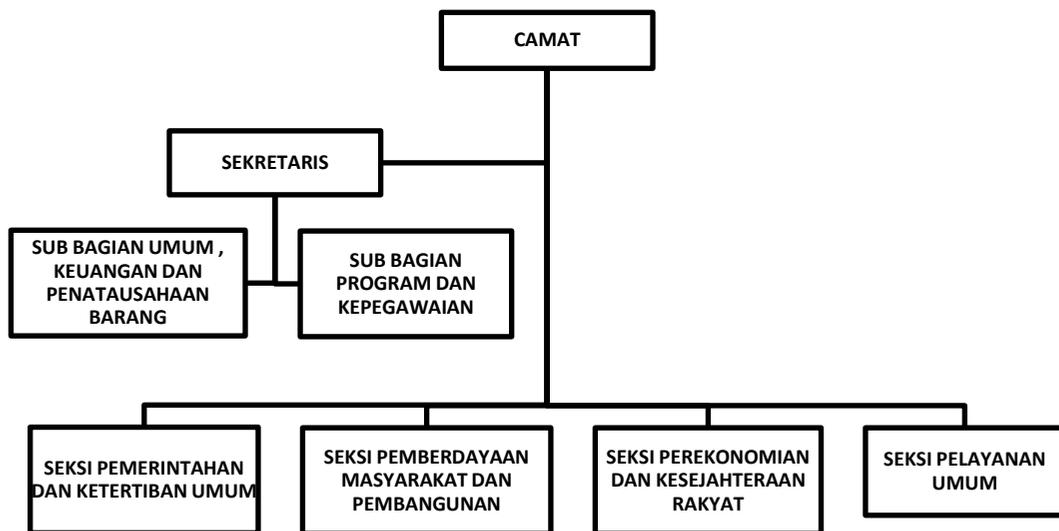
Untuk selanjutnya petunjuk teknis Pelaporan Kinerja diatur secara detail dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini diamanatkan bahwa Kepala SKPD menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Gubernur/ Bupati/ Walikota, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dengan demikian, untuk mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang diliputi semangat akuntabilitas, Kecamatan Sananwetan Kota Blitar secara periodik setiap tahun menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai sarana mempertanggungjawabkan pelaksanaan Kinerja Utama Kecamatan Sananwetan yang tertuang dalam bentuk Perjanjian Kinerja kepada pemberi mandat, dalam hal ini adalah pertanggungjawaban kepada Walikota Blitar. Di dalam laporan kinerja ini disampaikan hasil capaian kinerja Kecamatan Sananwetan secara terukur, sehingga LKjIP ini diproyeksikan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja, dan alat pendorong terwujudnya misi ke-6 Pemerintah Kota Blitar yang diemban oleh Kecamatan Sananwetan, yaitu: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Profesional. Dalam perspektif yang lebih luas, LKjIP ini dapat berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada masyarakat Kecamatan Sananwetan.

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan maka bagan Kecamatan Sananwetan Kota Blitar adalah sebagai berikut:

SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN SANANWETAN (Perwali Nomor 77 Tahun 2016)



Kedudukan Pemerintah Kecamatan sesuai dengan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008, bahwa Kecamatan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota yang dipimpin oleh Kepala Kecamatan yang disebut Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Merujuk pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Blitar yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 77 Tahun 2016, Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tugas :

1. Menyelenggarakan tugas menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;

2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Walikota;
5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
8. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Blitar yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Kota Blitar yang ada di kecamatan;
9. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh walikota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Blitar.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya Camat menjalankan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan dan penjabaran kebijakan operasional pelaksanaan tugas umum pemerintahan kecamatan;
2. Pengkoordinasian operasional program-program pemerintah di wilayah kerjanya;
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan dan pembinaan pemerintahan kelurahan;
4. Penyelenggaraan pelayanan umum terpadu kecamatan;
5. Penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pelayanan kependudukan sesuai peraturan perundangan;
6. Pembinaan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan;
7. Penyelenggaraan dan pembinaan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan rakyat dan penanggulangan masalah sosial;
8. Pengendalian dan pengawasan kegiatan pemerintahan serta penyelenggaraan tugas tampung tantra di wilayah kerjanya;
9. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Kecamatan;

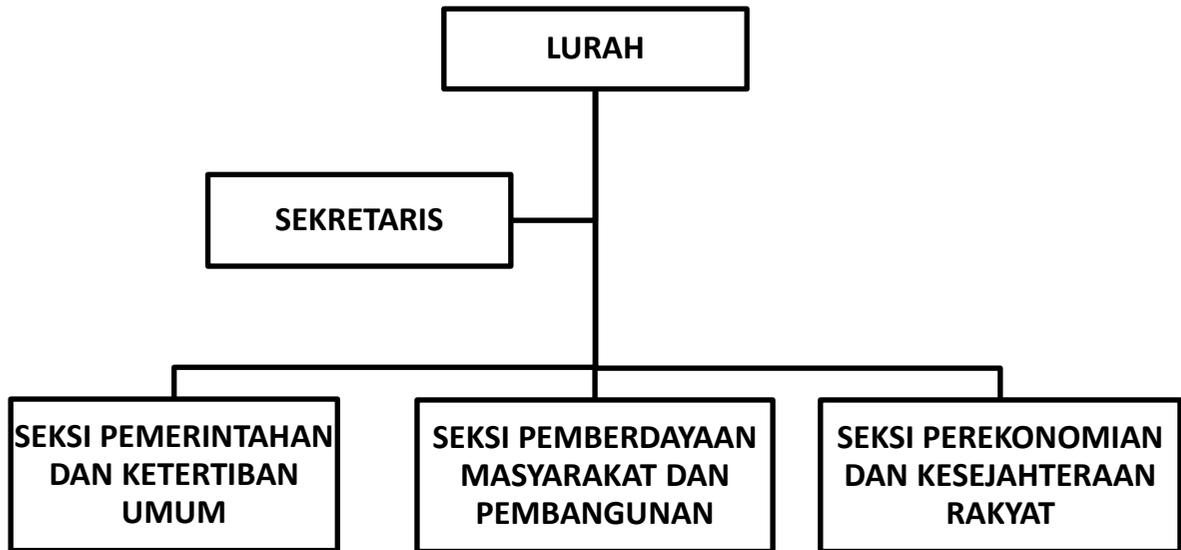
10. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan;
11. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
12. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
13. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
14. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
15. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
16. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
17. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait Kecamatan secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah;
18. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Kecamatan; dan
19. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Kecamatan terdiri dari:

1. Camat;
2. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang membawahi :
 - a. Sub bagian Program dan Kepegawaian;
 - b. Sub bagian Umum, Keuangan dan Penatausahaan Barang.
3. Seksi Pemerintahan dan Ketertarikan Ketertiban Umum (Trantibum);
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan;
5. Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat;
6. Seksi Pelayanan Umum.

**SUSUNAN ORGANISASI
KELURAHAN**

(Perwali Nomor 77Tahun 2016)



Merujuk pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Blitar yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 77 Tahun 2016, Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat dan dipimpin oleh seorang Lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat dengan tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. Melakukan pemberdayaan masyarakat;
- c. Melaksanakan pelayanan masyarakat;
- d. Memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. Memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat;
- g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya Lurah menjalankan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan operasional pelaksanaan tugas umum pemerintahan kelurahan;
- b. Penyelenggaraan pelayanan pemerintahan dan administrasi kependudukan di kelurahan;

- c. Pengkoordinasian dan fasilitasi kesejahteraan rakyat dan penanggulangan masalah sosial;
- d. Pengkoordinasian dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan;
- e. Pengkoordinasian pengelolaan sumber pendapatan asli daerah;
- f. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga kelurahan;
- g. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan;
- h. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
- i. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
- j. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- k. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- l. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
- m. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
- n. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait kelurahan secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah;
- o. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas kelurahan; dan
- p. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Kelurahan terdiri atas :

1. Lurah;
2. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris;
3. Seksi Pemerintahan dan Ketentraman Ketertiban Umum (Trantibum);
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan;
5. Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat;

Kelompok Jabatan Fungsional

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional di Kecamatan dibentuk oleh Camat dalam rangka mengorganisir pejabat-pejabat fungsional yang melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi masing-masing yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional di Kecamatan dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior di Kecamatan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Sananwetan Kota Blitar Tahun 2020 dimaksudkan sebagai salah satu media pertanggungjawaban yang akuntabel mengenai pengukuran capaian kinerja organisasi. LKjIP ini diharapkan dapat menjadi:

1. Umpan balik bagi peningkatan kinerja;
2. Sarana penilaian keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab instansi;
3. Daya dorong (Supporting Unit) bagi OPD lain untuk menyelenggarakan tugas umum dan pembangunan daerah dengan baik dan benar (good governance) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Mendorong tumbuhnya OPD yang akuntabel yang beroperasi secara efisien, efektif, dan responsive terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya;
5. Memelihara kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Tujuan pelaporan kinerja:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandate atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

D. DASAR HUKUM

Dasar hukum yang melandasi disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Sananwetan Kota Blitar tahun 2020, antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 2006 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
5. Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Reviu Atas Laporan Kinerja.
7. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar tahun 2016 – 2021.
8. Perda Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) TA 2020.
9. Peraturan Walikota Blitar Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.
10. Peraturan Walikota Blitar Nomor 74 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) TA 2020.

E. ASPEK-ASPEK STRATEGIS

Terdapat beberapa faktor internal dan faktor eksternal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Sananwetan Kota Blitar. Hal itu bisa dilihat dalam tabel dibawah ini:

ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL			
NO	KEKUATAN (S)	NO	KELEMAHAN (W)
S1	Telah ditetapkannya Peraturan Walikota Kota Blitar nomor 77 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja kecamatan dan kelurahan	W1	Terbatasnya kuantitas dan kualitas pegawai di Kelurahan dan Kecamatan Sananwetan
S2	Terpenuhinya anggaran dalam rangka pelaksanaan tupoksi aparatur	W2	Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dilakukan dengan dokumen-dokumen perencanaan
S3	Tersedianya sarana dan prasarana yang relative memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di Kecamatan dan Kelurahan	W3	Kurang maksimalnya manajemen pengelolaan aset daerah
S4	Pola kerja yang sistematis dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efektif dan efisien	W4	Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan

ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL			
NO	PELUANG (O)	NO	TANTANGAN (T)
O1	Terjalinnnya koordinasi yang baik dengan OPD lain	T1	Tuntutan aspirasi masyarakat yang semakin beragam
O2	Adanya kebijakan Kepala Daerah yang memperkuat kapasitas Kecamatan dan Kelurahan sekota Blitar	T2	Tuntutan pelayanan masyarakat yang cepat, tepat dan akurat
O3	Adanya partisipasi masyarakat yang cukup baik	T3	Lemahnya pemahaman masyarakat terkait peraturan perundangan-undangan yang berlaku
O4	Perkembangan teknologi dan informasi yang sangat pesat, sehingga sangat membantu kelancaran pelaksanaan tugas	T4	Perubahan peraturan perundang-undangan yang terlalu sering

F. ISU-ISU STRATEGIS

Isu – isu strategis adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi OPD di masa datang, suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu- isu dan permasalahan yang mungkin di hadapi ke depan oleh masyarakat, sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Secara umum isu dan permasalahan yang dihadapi Kecamatan Sananwetan antara lain:

1. Belum optimalnya pelayanan di Kecamatan;
2. Belum optimalnya koordinasi di bidang pemerintahan dan pembangunan di wilayah.

Dengan mengetahui isu-isu strategis yang dihadapi, diharapkan dapat menganalisis lingkungan internal yang perlu mendapat fokus lebih untuk ditingkatkan, strategi yang relevan untuk meningkatkan, serta pengembangan organisasi yang mengarah pada pencapaian tujuan.

BAB 11 PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu. Rencana Strategis merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagai perwujudan Visi dan Misi Kepala Daerah. Di dalam Rencana Strategis ini termuat tujuan, sasaran dan program yang mengacu pada visi, misi, tujuan serta sasaran RPJMD Kota Blitar.

Rencana Strategis Kecamatan Sananwetan 2016-2021 telah mempertimbangkan baik tentang kondisi dan potensi serta prospek perkembangan sebagai kekuatan untuk menentukan kunci keberhasilan maupun yang menyangkut hambatan, kendala, dan resiko yang dihadapi sebagai kelemahan dan tantangan yang harus ditanggulangi. Berdasarkan Visi pembangunan Kota Blitar yang ingin diwujudkan pada periode 2016-2021 yang tertuang dalam RPJMD Kota Blitar periode (2016-2021) adalah :

“Masyarakat Kota Blitar Semakin Sejahtera Melalui APBD Pro Rakyat Pada Tahun 2021”

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka disusunlah misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya –upaya yang akan dilaksanakan, dimana Kecamatan Sananwetan berada pada misi keenam :

“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Profesional”

Mengacu dari misi keenam inilah disusun tujuan, sasaran dan indikator kinerja Kecamatan Sananwetan Kota Blitar yang akan dicapai selama periode perencanaan strategis dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

NO	Tujuan		Sasaran	Indikator Sasaran
	Uraian	Indikator		
1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pelayanan Kecamatan Sananwetan	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Sananwetan	Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan untuk kepuasan masyarakat	Persentase masyarakat yang puas terhadap pelayanan Kecamatan Sananwetan
			Meningkatnya koordinasi di bidang pemerintahan dan pembangunan di wilayah	Persentase jumlah koordinasi di bidang pemerintahan/ keamanan/ ketertiban/ kesejahteraan sosial/ pembangunan di wilayah yang ditindaklanjuti

Untuk mencapai sasaran diperlukan strategi dan kebijakan yang harus dilakukan:

Tabel II.2 Strategi dan Kebijakan untuk mencapai sasaran

Misi VI: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Profesional			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pelayanan Kecamatan Sananwetan	Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan untuk kepuasan masyarakat	Mengoptimalkan upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat	Penyediaan sarana dan prasarana yang representatif
	Meningkatnya koordinasi di bidang pemerintahan dan pembangunan di wilayah	Mengoptimalkan koordinasi bidang pemerintahan dan pembangunan di wilayah dan menindaklanjuti	Meningkatkan kerja sama dengan OPD lain

Sedangkan program-program dan kegiatan yang dilaksanakan selama periode RENSTRA adalah sebagai berikut :

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan
1	3	6
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dibidang pelayanan kecamatan	1. Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan untuk kepuasan masyarakat	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN DAN KELURAHAN
		Fasilitasi Pelayanan Prima
	2. Meningkatnya koordinasi di bidang pemerintahan dan pembangunan di wilayah	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN
		Evaluasi Kelurahan Berhasil
		Fasilitasi Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
		Fasilitasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat
		Fasilitasi Pembinaan Pemuda dan Olah Raga
		Pemberdayaan lembaga dan organisasi kemasyarakatan kelurahan
		Pengendalian Keamanan Lingkungan Kecamatan/Kelurahan
		Peningkatan Keberdayaan Sosial dan Ekonomi Masyarakat
		Peningkatan Kesadaran akan Nilai - Nilai Luhur Kebangsaan
		Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup
		Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
		Penyusunan Monografi Kelurahan/Kecamatan
Penyusunan Profil Kelurahan/Kecamatan		
Fasilitasi Penunjang Penyelenggaraan Pemilihan Umum		
Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Adat Istiadat		

Selain program dan kegiatan di atas, program dalam Urusan Administrasi Umum yang dilaksanakan oleh Kecamatan Sananwetan adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Perkantoran
2. Program Peningkatan Kapasitas Perangkat Daerah
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan kinerja tujuan, sasaran, dan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja ditandatangani oleh kepala Perangkat Daerah dengan Walikota Blitar sebagaimana terlampir. Perjanjian kinerja didasarkan pada sasaran strategis, indikator dan target yang telah dituangkan dalam rencana kinerja sebagaimana tabel berikut :

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KECAMATAN SANANWETAN KOTA BLITAR**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di bidang pelayanan Kecamatan Sananwetan	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Sananwetan	Baik
2	Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan untuk kepuasan masyarakat	Persentase masyarakat yang puas terhadap pelayanan Kecamatan Sananwetan	95%
3	Meningkatnya koordinasi di bidang pemerintahan dan pembangunan di wilayah	Persentase jumlah koordinasi di bidang pemerintahan/keamanan/ketertiban/kesejahteraan sosial/ pembangunan di wilayah yang ditindaklanjuti	100%
4	Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat	Persentase pelayanan tepat waktu	95%
5	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat, pemerintahan dan pembangunan	Persentase pembinaan di bidang Pemerintahan, Keamanan dan ketertiban, kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di wilayah yang ditindaklanjuti	100%

PROGRAM	ANGGARAN
1. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN DAN KELURAHAN	Rp 824.701.345,00
2. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN	Rp 8.912.700.202,00
3. PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN	Rp 3.402.185.648,00
4. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DAERAH	Rp 121.089.000,00
5. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Rp 27.821.650,00
JUMLAH	Rp 13.288.497.845,00

Sumber: Perjanjian Kinerja Perubahan Camat Sananwetan Tahun 2020

BAB 111 AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA/ SASARAN

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik kepada pihak yang memberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas. Untuk mewujudkan organisasi yang akuntabel perlu dilakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang telah dicapai dengan kinerja yang seharusnya dicapai. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara periodik per tribulan dan per tahun. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.

Capaian kinerja organisasi merupakan capaian sasaran strategis yang diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi pada indikator kinerja sasaran strategis tersebut. Pada capaian kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan capaian strategis untuk kemudian dapat disusun tindak lanjut yang harus dipenuhi untuk melakukan perbaikan ataupun peningkatan. Untuk perbaikan dan peningkatan kinerja berbasis hasil evaluasi dapat dirumuskan solusi yang perlu dilakukan, analisis atas efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya, dan analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja.

Pengukuran capaian kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan/ sasaran serta pelaksanaan kegiatan dan program yang ditetapkan dalam RENSTRA.

Adapun cara menghitung capaian indikator kinerja dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

1. Rumus 1 : Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Rumus 2 : Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase tingkat capaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Untuk menetapkan analisis pencapaian kinerja, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 beserta petunjuk pelaksanaannya telah menetapkan standart penilaian dengan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

No	Nilai Capaian Kinerja		Pemberian Atribut
	%	Keterangan Prosentase	
1.	85% s.d 100%	Delapan puluh lima persen sampai dengan seratus persen	Sangat Berhasil
2.	70% s.d < 85%	Tujuh puluh persen sampai dengan kurang dari delapan puluh lima persen	Berhasil
3.	55% s.d < 70%	Lima puluh lima persen sampai dengan kurang dari tujuh puluh persen	Cukup Berhasil
4.	< 55%	Di bawah lima puluh lima persen	Tidak Berhasil

Pengukuran kinerja berisi tujuan/ sasaran/ Kinerja Utama/ Program/ Kegiatan, indikator kinerja dan pencapaian target masing-masing indikator. Pengukuran kinerja sebagaimana yang telah ditentukan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja dapat dilihat secara rinci sebagai berikut:

Tabel. III.1. Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2020

Tujuan/ Sasaran/ Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan untuk kepuasan masyarakat	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)		Baik	Baik	Baik
Meningkatnya kualitas pelayanan public di bidang pelayanan	Persentase masyarakat yang puas terhadap pelayanan Kecamatan Sananwetan	%	95	95	100 %

Meningkatnya koordinasi di bidang pemerintahan dan pembangunan di wilayah	Persentase jumlah koordinasi di bidang pemerintahan / keamanan / ketertiban/kesejahteraan sosial / pembangunan di wilayah yang ditindaklanjuti	%	100	100	100 %
---	--	---	-----	-----	-------

Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2020 berdasarkan hasil pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan di Kecamatan Sananwetan atas berbagai pelayanan yang dilaksanakan oleh seksi diperoleh nilai sebesar 81,37 yang berarti memiliki nilai dengan predikat BAIK.

1. ANALISIS CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN TARGET DAN REALISASI TAHUN 2020

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sananwetan “Meningkatnya kualitas pelayanan publik dibidang pelayanan kecamatan” dengan indikator kinerjanya “Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan” bernilai baik. Aktivitas pelayanan publik memang selayaknya memperhatikan kepuasan masyarakat karena hal itu menunjukkan kualitas pelayanan yang diterima dari penyelenggara pelayanan. Dalam hal itu, semakin tinggi tingkat kepuasan masyarakat yang menunjukkan semakin tinggi pula mutu pelayanan yang dilaksanakan. Maka pada setiap tahunnya Kecamatan Sananwetan rutin melakukan pengukuran kualitas pelayanan publiknya melalui Survey Kepuasan Masyarakat yang pada Tribulan I dan proses analisisnya pada Tribulan II.

Tabel III.2 Capaian Kinerja Tujuan

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan	baik	baik	baik

Sumber: Hasil Survey Kepuasan Kecamatan Sananwetan Tahun 2020

Secara keseluruhan 9 (Sembilan) unsur dalam penilaian kualitas pelayanan (persyaratan pelayanan, prosedur pelayanan, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan dan sarana prasarana) melalui Survey Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Sananwetan pada Tahun 2020 memiliki mutu pelayanan A, yang artinya sangat memuaskan para pengguna layanan dengan nilai SKM 81,37.

Sedangkan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran diuraikan menurut indikator kinerja (sasaran strategis) dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Analisis ini menjelaskan lebih lanjut tentang pelaksanaan, permasalahan, dan solusi terhadap permasalahan yang ada untuk perbaikan di

masa yang akan datang. Penjelasan atas capaian masing-masing sasaran terhadap target yang direncanakan dalam tahun 2020 diuraikan sebagai berikut:

I. Meningkatkan kualitas pelayanan Kecamatan untuk kepuasan masyarakat

Indikator kinerja untuk sasaran strategis yang pertama ini adalah Persentase masyarakat yang puas terhadap pelayanan Kecamatan Sananwetan, capaian indikator kinerja utama dapat diukur dengan formulasi:

$$= \frac{\text{Jumlah masyarakat pencari pelayanan yang puas terhadap pelayanan}}{\text{Jumlah masyarakat pencari layanan}} \times 100\%$$

Data jumlah masyarakat pencari pelayanan baik yang puas maupun tidak puas terhadap pelayanan yang digunakan dalam perhitungan berasal dari buku tamu yang disediakan di ruang pelayanan. Setiap masyarakat pencari pelayanan memberikan testimoni tentang pelayanan yang diperoleh dengan mencatatkan testimoni di buku tersebut.

$$\begin{aligned} \text{Formulasi} &= \frac{\text{Jumlah masyarakat pencari pelayanan yang puas terhadap pelayanan}}{\text{Jumlah masyarakat pencari layanan}} \times 100\% \\ &= \frac{3937}{4145} \times 100\% \\ &= 95\% \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan, realisasi kinerja utama yang pertama dengan indikator persentase masyarakat yang puas terhadap pelayanan Kecamatan Sananwetan sebesar 95 %, sedangkan target yang ditetapkan adalah sebesar 95%. Realisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan sehingga didapat capaian kinerja utama yang pertama sebesar 100 %, dengan kategori **sangat berhasil**.

Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase masyarakat yang puas terhadap pelayanan Kecamatan Sananwetan sesuai dengan target, yaitu: **Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan Dan Kelurahan**, dengan kegiatan Fasilitasi Pelayanan Prima. Di dalam kegiatan ini terdapat fasilitasi nikah gratis untuk masyarakat Kecamatan Sananwetan serta fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan.

Secara garis besar, pelaksanaan program dan kegiatan ini telah berkontribusi terhadap kepuasan masyarakat pencari pelayanan. Namun demikian, upaya peningkatan pelayanan tetap perlu dilakukan yaitu dengan peningkatan kapasitas ASN yang memberikan pelayanan secara langsung

kepada masyarakat serta peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan yang disesuaikan dengan perkembangan jaman dan kebutuhan masyarakat.

II. Meningkatkan koordinasi di bidang pemerintahan dan pembangunan di wilayah

Indikator kinerja untuk sasaran strategis yang kedua ini adalah Persentase jumlah koordinasi di bidang pemerintahan / keamanan / ketertiban/kesejahteraan sosial / pembangunan di wilayah yang ditindaklanjuti, capaian indikator kinerja utama dapat diukur dengan:

$$\begin{aligned}\text{Formulasi} &= \frac{\text{Jumlah koordinasi yang ditindaklanjuti pada tahun n}}{\text{Jumlah seluruh koordinasi pada tahun n}} \times 100\% \\ &= \frac{2946}{2946} \times 100\% \\ &= 100\%\end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan, realisasi kinerja utama yang kedua dengan indikator persentase jumlah koordinasi di bidang pemerintahan/ keamanan/ ketertiban/kesejahteraan sosial/ pembangunan di wilayah yang ditindaklanjuti sebesar 100 %, sedangkan target yang ditetapkan adalah sebesar 100%. Realisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan sehingga didapat capaian kinerja utama yang kedua sebesar 100 %, dengan kategori **sangat berhasil**.

Data jumlah koordinasi dalam perhitungan diperoleh dari buku register surat/ undangan masuk dan keluar beserta catatan tindak lanjutnya. Koordinasi yang dilakukan mencakup bidang pemerintahan, keamanan, ketertiban, kesejahteraan social, pembangunan terdiri dari koordinasi dengan OPD lain, koordinasi dengan masyarakat, serta koordinasi internal Kecamatan Sananwetan.

Berikut adalah rekapitulasi secara umum koordinasi yang dilakukan pada tahun 2020, baik dengan OPD lain, dengan masyarakat, maupun koordinasi internal Kecamatan Sananwetan:

- Koordinasi dengan **Lurah** se-Kecamatan Sananwetan, diantaranya terkait dengan kegiatan Musrenbang; kegiatan kerja bakti serentak; kegiatan prokasih; kegiatan pembinaan Kamtibmas; peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan; pelaksanaan pemungutan PBB-P2; Kepesertaan Program BPJS, penerima manfaat rastrada, peserta khitanan massal tahun 2020 dsb; serta koordinasi Kelurahan dengan OPD lain.

- Koordinasi dengan **Bappeda**, diantaranya terkait dengan pelaksanaan Musrenbang, perencanaan program dan kegiatan, evaluasi perencanaan, Tim SIPD, penyusunan profil.
- Koordinasi dengan **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**, diantaranya terkait dengan kependudukan dan pelayanan masyarakat, laporan data serta pemutakhiran data kependudukan.
- Koordinasi dengan **Dinas Kesehatan**, diantaranya tentang isu-isu/ permasalahan di bidang kesehatan seperti pelaksanaan imunisasi, posyandu balita, posyandu lansia, dan posyandu jiwa, kader yang berkaitan dengan giat kesehatan, Penerbitan SK untuk Posyandu, Koordinasi Lomba Kota sehat; Pelepasan peserta rumah karantina Gelombang XIV Kota Blitar.
- Koordinasi dengan **Bagian Perekonomian dan Kesra**, diantaranya terkait data bidang kesejahteraan rakyat.
- Koordinasi dengan **Dinas Sosial**, diantaranya terkait tentang pelaksanaan pendistribusian rastrada dan fasilitasi di bidang sosial untuk masyarakat yang mempunyai permasalahan sosial.
- Koordinasi dengan **BPKAD**, diantaranya tentang laporan keuangan, persediaan barang, dan barang milik daerah, PAD; pelaksanaan pemungutan PBB-P2; penyusunan anggaran;
- Koordinasi dengan **Inspektorat Daerah**, diantaranya tentang pemeriksaan BPK, penyusunan anggaran, evaluasi SAKIP, SPIP.
- Konsultasi dengan **Walikota Blitar**, diantaranya tentang Penyelenggaraan Musrenbang, Surat Perintah, Peraturan daerah, Relokasi Kantor Kelurahan, dan tentang Himbauan Walikota.
- Koordinasi dengan **Sekretariat Daerah**, diantaranya tentang pengadaan bingkisan hari raya untuk RT, RW, dan LPMK.
- Koordinasi dengan **Dinas Lingkungan Hidup**, diantaranya membahas tentang tenaga kebersihan.
- Koordinasi dengan **Polsek dan Koramil Sananwetan**, diantaranya tentang bantuan di bidang Kamtibmas, narasumber simulasi pengamanan Pemilu, pelaksanaan lomba TPS dan lomba yang terkait dengan Kamtibmas, Kerja Bakti, dan koordinasi di bidang kamtibmas lainnya.
- Koordinasi dengan **Bakesbangpol PBD dan KPU** , diantaranya permohonan bantuan personil, surat rekomendasi penelitian.

- Koordinasi dengan **Satuan Polisi Pamong Praja**, diantaranya tentang permintaan data personil linmas PAM TPS di posko kecamatan dan kelurahan.
- Koordinasi dengan **Dinas Perumahan Rakyat**, diantaranya tentang perbaikan jalan di perumahan rakyat.
- Koordinasi dengan **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**, diantaranya tentang perintah pembongkaran pembangunan fiber optic PT.Aplikanusalin.
- Koordinasi dengan **Dinas Kominfo dan Statistik**, diantaranya tentang pengembangan aplikasi Silpusitron, pelaksanaan e-purchasing, publikasi kegiatan.
- Koordinasi dengan **Dinas Pertanian**, diantaranya tentang Survey Konsumsi Pangan Masyarakat;
- Koordinasi dengan **Bagian Tata Pemerintahan**, diantaranya tentang pelaporan kinerja, LPPD, pelaksanaan Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan, serta koordinasi lainnya di bidang tata pemerintahan;
- Koordinasi dengan **BPN Kota Blitar**, diantaranya tentang pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan PPATK;
- Koordinasi dengan **Dinas P3A P2KB**, diantaranya tentang forum anak, satgas perlindungan anak, dan pertemuan rutin dan pembinaan Satgas PPA Kota Blitar;

Selain tersebut di atas, koordinasi juga dilaksanakan dengan DPRD Kota Blitar, Badan Kepegawaian Daerah, Dinas Perhubungan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan PTSP, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan,

Program dan kegiatan yang mendukung tercapainya indikator kinerja utama ini secara garis besar sudah dilaksanakan secara optimal untuk tercapainya koordinasi yang baik di wilayah. Namun demikian tetap perlu untuk melakukan peningkatan kerja sama dengan OPD lain. Selain itu membangun jejaring komunikasi yang efektif baik internal dan eksternal yang dapat menjamin ketepatan dan kecepatan aliran informasi juga perlu untuk lebih dioptimalkan.

Program 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat, ditetapkan 1 indikator kinerja yaitu: Persentase pelayanan tepat waktu, dengan target 95%, terealisasi 95%, hal ini dibuktikan hanya ada 5% dari jumlah pencari layanan kecamatan yang tidak terlayani tepat waktu karena terkendala Pimpinan tidak ada di tempat.

Program 2 : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat, pemerintahan dan pembangunan, ditetapkan 1 indikator kinerja yaitu : Persentase pembinaan di bidang Pemerintahan, Keamanan dan ketertiban, kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di wilayah yang ditindaklanjuti. Target dari program ini adalah 100%, dan terealisasi sebesar 100%. Hal ini bisa dibuktikan dengan koordinasi dan pembinaan yang telah ditindaklanjuti. Berdasarkan evaluasi kinerja yang diolah dari formulir pengukuran kinerja diperoleh kesimpulan bahwa pada tahun 2020 semua program dan kegiatan telah memberikan kontribusi kepada visi dan misi Kota Blitar. Dalam pelaksanaan misi organisasi guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Kecamatan Sananwetan memiliki nilai rata-rata capaian sebesar 100%.

2. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2019 – 2020

Tabel. III.3 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2019 dengan Tahun 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dibidang pelayanan kecamatan	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan	Baik	Baik	Baik	Baik
Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan untuk kepuasan masyarakat	Persentase masyarakat yang puas terhadap pelayanan Kecamatan Sananwetan	92%	92 %	95%	95 %
Meningkatnya koordinasi di bidang pemerintahan dan pembangunan di wilayah	Persentase jumlah koordinasi di bidang pemerintahan / keamanan / ketertiban/kesejahteraan sosial / pembangunan di	100%	100 %	100%	100 %

	wilayah yang ditindaklanjuti					
--	------------------------------	--	--	--	--	--

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dibandingkan tahun sebelumnya capaian kinerja untuk tahun 2019 sama dengan capaian kinerja tahun 2020. Target IKM pada tahun 2019 adalah Baik realisasi Baik sama dengan Target dan Realisasi pada Tahun 2020 yaitu Baik. Untuk Indikator Sasaran Pertama Target tahun 2019 sebesar 92% dan realisasi 92% sama dengan realisasi yang ditetapkan tahun 2020 yaitu 95% dengan target 95%.

Untuk Indikator Sasaran kedua yaitu persentase jumlah koordinasi di bidang pemerintahan / keamanan / ketertiban/kesejahteraan sosial / pembangunan di wilayah yang ditindaklanjuti, capaian kinerja untuk tahun 2020 sama dengan capaian kinerja tahun 2019, sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu 100%.

Tabel. III.4

**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dan Tahun 2020
(Kecamatan Sananwetan dan Kecamatan Sukorejo)**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KECAMATAN SANANWETAN				KECAMATAN SUKOREJO			
			TARGET		REALISASI		TARGET		REALISASI	
			2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dibidang pelayanan kecamatan	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan	baik	baik	baik	baik	baik	baik	baik	baik
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan untuk Kepuasan Masyarakat	Persentase masyarakat yang puas terhadap layanan kecamatan	92	95	92	95	92	94	93	100
3	Meningkatnya koordinasi dibidang	Persentase jumlah koordinasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

pemerintahan dan pembangunan di wilayah	dan pembinaan dibidang pemerintaha, keamanan dan ketertiban, kesejahteraan social dan pembangunan di wilayah yang ditindaklanjuti								
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

3. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN AKHIR PERIODE RENSTRA

Tabel. III.5 Perbandingan realisasi kinerja IKU 2020 dengan target akhir renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	KINERJA TAHUN 2020		TARGET AKHIR RENSTRA 2016-2021 (%)	TINGKAT KEMAJUAN (%)
		Target	Realisasi		
1	2	4	5	6	7
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dibidang pelayanan kecamatan	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan	Baik	Baik	Baik	Baik
Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan untuk kepuasan masyarakat	Persentase masyarakat yang puas terhadap pelayanan Kecamatan Sananwetan	95 %	95 %	98 %	97 %
Meningkatnya koordinasi di bidang pemerintahan dan pembangunan di wilayah	Persentase jumlah koordinasi di bidang pemerintahan / keamanan / ketertiban/kesejahteraan sosial / pembangunan di wilayah yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %	100 %

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa untuk IKU persentase masyarakat yang puas terhadap pelayanan Kecamatan Sananwetan, capaian realisasi kinerja tahun 2020 terhadap target akhir renstra 2016-2021 sebesar 97%. Capaian realisasi kinerja tahun 2020 sebesar 95% dan target akhir renstra 2016-2021 sebesar 98%.

Untuk IKU persentase jumlah koordinasi di bidang pemerintahan / keamanan / ketertiban/kesejahteraan sosial / pembangunan di wilayah yang

ditindaklanjuti, capaian kinerja untuk tahun 2020 sudah sama atau telah mencapai target akhir renstra 2016-2021 yaitu 100%.

B. Akuntabilitas Keuangan

Keberhasilan capaian indikator kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan, tidak terlepas dari dukungan dana untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang mendukung tercapainya kinerja utama Kecamatan Sananwetan.

Tabel di bawah ini menyajikan data belanja langsung Kecamatan Sananwetan Tahun 2020 :

Tabel III.6 Realisasi Anggaran Belanja Langsung untuk Setiap Program dan Kegiatan Tahun 2020

Kecamatan Sananwetan			
Program/Kegiatan	Jumlah (Rp)		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
BELANJA LANGSUNG	3.771.904.265,00	3.674.307.306,14	97,41%
PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN	1.375.990.148,00	1.334.671.472,80	97,00%
Honorarium PNS	5.846.000,00	5.040.000,00	86,21%
Belanja Bahan Paki Habis	100.102.800,00	94.582.224,00	94,49%
Belanja Jasa Kantor	361.678.313,00	335.016.668,90	92,63%
Belanja Cetak dan Penggandaan	24.676.200,00	24.671.000,00	99,98%
Belanja Makanan dan Minuman	38.528.800,00	35.273.600,00	91,55%
Belanja Perjalanan Dinas	55.817.500,00	54.896.200,00	98,35%
Belanja Bahan/Material	13.222.000,00	13.222.000,00	100,00%
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	42.484.356,00	41.525.800,00	97,74%
Belanja Pemeliharaan	171.272.800,00	170.631.800,00	99,63%
Belanja barang Non Kapitalisaasi	17.518.681,00	17.518.000,00	100,00%
Belanja Modal Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	191.247.798,00	190.644.479,90	99,68%
Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	31.384.300,00	31.379.700,00	99,99%
Belanja Modal Pengadaan Komputer	121.759.800,00	121.435.000,00	99,73%
Belanja Modal Pengadaan Alat -alat studio	18.695.800,00	18.695.000,00	100,00%

Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	101.755.000,00	101.340.000,00	99,59%
Belanja Modal Aset Lainnya	80.000.000,00	78.800.000,00	98,50%
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DAERAH	43.823.200,00	43.715.400,00	99,75%
Honorarium PNS	625.000,00	530.000,00	84,80%
Belanja Jasa Kantor	12.364.400,00	12.364.400,00	100,00%
Belanja Makanan dan Minuman	5.700.000,00	5.700.000,00	100,00%
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	25.133.800,00	25.121.000,00	99,95%
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	17.245.000,00	17.103.600,00	99,18%
Belanja Cetak dan Penggandaan	1.730.000,00	1.730.000,00	100,00%
Belanja Makanan dan Minuman	5.484.600,00	5.484.600,00	100,00%
Belanja Jasa Konsultasi	10.030.400,00	9.889.000,00	98,59%
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN DAN KELURAHAN	317.468.020,00	317.197.799,80	99,91%
Honorarium PNS	705.000,00	690.000,00	97,87%
Belanja Bahan Pakai Habis	4.129.100,00	4.129.100,00	100,00%
Belanja Jasa Kantor	241.226.420,00	241.138.799,80	99,96%
Belanja Cetak dan Penggandaan	7.237.000,00	7.237.000,00	100,00%
Belanja Makanan dan Minuman	20.820.500,00	20.813.900,00	99,97%
Belanja Pakaian Kerja	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00%
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	10.450.000,00	10.450.000,00	100,00%
Belanja Jasa Konsultasi	15.000.000,00	14.839.000,00	98,93%
Belanja Barang/Jasa selain Hibah dan Bantuan Sosial yang diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00%
Belanja Jasa Tenaga Ahli dan Narasumber	6.900.000,00	6.900.000,00	100,00%
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN	2.017.377.897,00	1.961.619.033,54	97,24%
Honorarium PNS	8.386.000,00	6.610.000,00	78,82%
Belanja Bahan Pakai Habis			97,00%

	45.908.000,00	44.529.800,00	
Belanja Bahan/Material	66.600.000,00	65.441.000,00	98,26%
Belanja Jasa Kantor	132.872.497,00	118.367.200,00	89,08%
Belanja Cetak dan Penggandaan	47.684.900,00	47.665.100,00	99,96%
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.381.800,00	7.921.400,00	94,51%
Belanja Makanan dan Minuman	449.994.200,00	430.679.000,00	95,71%
Belanja Pakaian Kerja	13.150.000,00	13.150.000,00	100,00%
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	10.500.000,00	10.500.000,00	100,00%
Belanja Barang/Jasa selain Hibah dan Bantuan Sosial yang diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	243.185.600,00	233.873.000,00	96,17%
Belanja Tenaga Ahli dan Narasumber	7.400.000,00	6.650.000,00	89,86%
Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	13.034.900,00	12.017.500,00	92,19%
Belanja Modal Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00%
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.800.000,00	1.600.000,00	88,89%
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Menara	10.980.000,00	10.980.000,00	100,00%
Belanja Modal Pengadaan jalan	750.000.000,00	745.171.643,86	99,36%
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air Minum Bersih	200.000.000,00	198.963.389,68	99%

Kelurahan Gedog

Program/Kegiatan	Jumlah (Rp)		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
BELANJA LANGSUNG	1.395.798.207,00	1.371.852.740,00	98,28%
PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN	192.631.570,00	186.060.840,00	96,59%
Honorarium PNS	350.000	340.000	97,14%
Belanja Bahan Paki Habis	23.287.200	23.287.300	100,00%
Belanja Jasa Kantor	39.987.200	33.954.170	84,91%
Belanja Cetak dan Penggandaan	4.637.400	4.637.400	100,00%
Belanja Makanan dan Minuman	10.312.200	10.312.200	100,00%
Belanja Bahan/Material	9.939.000	9.939.000	100,00%

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.195.800	5.673.000	91,56%
Belanja Pemeliharaan	54.164.970	54.164.970	100,00%
Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	5.757.800	5.757.800	100,00%
Belanja Modal Pengadaan Komputer	38.000.000	37.995.000	99,99%
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DAERAH	13.697.100,00	13.697.100,00	100,00%
Belanja Jasa Kantor	4.092.500	4.092.500	100,00%
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	9.604.600	9.604.600	100,00%
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	400.000,00	400.000,00	100,00%
Belanja Bahan Pakai Habis	165.200	165.200	100,00%
Belanja Cetak dan Penggandaan	234.800	234.800	100,00%
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN DAN KELURAHAN	109.395.800,00	106.995.800,00	97,81%
Honorarium PNS	180.000	180.000	100,00%
Belanja Bahan Paki Habis	6.977.400	6.977.400	100,00%
Belanja Bahan/Material	2.100.000	2.100.000	100,00%
Belanja Jasa Kantor	65.974.800	63.574.800	96,36%
Belanja Cetak dan Penggandaan	14.292.400	14.292.400	100,00%
Belanja Makanan dan Minuman	6.971.200	6.971.200	100,00%
Belanja Jasa Konsultasi	12.500.000	12.500.000	100,00%
Belanja Jasa Tenaga Ahli dan Narasumber	400.000	400.000	100,00%
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN	1.079.673.737,00	1.064.699.000,00	98,61%
Honorarium PNS	1.150.000	790.000	68,70%
Belanja Bahan Paki Habis	13.629.137	7.307.400	53,62%
Belanja Bahan/Material	67.444.400	67.444.400	100,00%
Belanja Jasa Kantor	285.690.800	275.696.800	96,50%
Belanja Cetak dan Penggandaan	9.832.400	6.476.400	65,87%
Belanja Makanan dan Minuman			95,27%

	184.977.000	176.234.000	
Belanja Pakaian Kerja	65.750.000	73.750.000	112,17%
Belanja Jasa Tenaga Ahli dan Narasumber	10.800.000	9.800.000	90,74%
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	28.000.000	28.000.000	100,00%
Belanja Barang/Jasa selain Hibah dan Bantuan Sosial yang diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	195.500.000	195.500.000	100,00%
Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah tangga	5.000.000	5.000.000	100,00%
Belanja Modal Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	7.500.000	7.500.000	100,00%
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	179.400.000	186.200.000	103,79%
Belanja Modal Pengadaan bangunan Air Kotor	25.000.000	25.000.000	100,00%

Kelurahan Bendogerit

Program/Kegiatan	Jumlah (Rp)		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
BELANJA LANGSUNG	1.414.125.066,00	1.378.262.513,00	97,46%
PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN	275.304.650,00	262.321.493,00	95,28%
Honorarium PNS	890.000	1.400.000	157,30%
Belanja Bahan Paki Habis	26.409.750	23.531.840	89,10%
Belanja Jasa Kantor	5.640.000	5.640.000	100,00%
Belanja Cetak dan Penggandaan	10.546.400	10.546.400	100,00%
Belanja Makanan dan Minuman	4.687.000	4.687.000	100,00%
Belanja Jasa Kantor	34.080.000	25.047.353	73,50%
Belanja Bahan/Material	9.300.000	9.300.000	
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	8.418.000	7.367.000	87,51%
Belanja Pemeliharaan	118.955.700	118.954.100	100,00%
Belanja Barang Non Kapitalisasi	2.913.400	2.913.400	100,00%
Belanja Modal Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	6.671.100	6.581.100	98,65%
Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	16.528.300	16.353.300	98,94%
Belanja Modal Pengadaan Komputer	30.265.000	30.000.000	99,12%

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DAERAH	6.950.000,00	6.950.000,00	100,00%
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6.950.000	6.950.000	100,00%
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	1.345.000,00	1.345.000,00	100,00%
Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000	800.000	100,00%
Belanja Makanan dan Minuman	545.000	545.000	100,00%
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN DAN KELURAHAN	75.551.720,00	65.111.720,00	86,18%
Honorarium PNS	90.000	-	0,00%
Belanja Bahan Pakai Habis	2.402.520	2.402.520	100,00%
Belanja Jasa Kantor	56.000.000	46.400.000	82,86%
Belanja Cetak dan Penggandaan	4.300.000	3.550.000	82,56%
Belanja Makanan dan Minuman	4.759.200	4.759.200	100,00%
Belanja Jasa Konsultasi	8.000.000	8.000.000	100,00%
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN	1.054.973.696,00	1.042.534.300,00	98,82%
Honorarium PNS	1.785.000	1.410.000	78,99%
Belanja Bahan Pakai Habis	55.568.136	57.707.800	103,85%
Belanja Bahan/Material	130.559.000	137.059.000	104,98%
Belanja Jasa Kantor	266.247.160	259.766.200	97,57%
Belanja Cetak dan Penggandaan	12.996.200	12.621.200	97,11%
Belanja Sewa Tanah/Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.750.000	3.750.000	100,00%
Belanja Makanan dan Minuman	182.968.200	169.880.100	92,85%
Belanja Pakaian Kerja	7.500.000	7.500.000	100,00%
Belanja Jasa Tenaga Ahli dan Narasumber	24.900.000	24.300.000	97,59%
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6.000.000	5.840.000	97,33%
Belanja Barang/Jasa selain Hibah dan Bantuan Sosial yang diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	112.600.000	112.600.000	100,00%

Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat kerja	39.600.000	39.600.000	100,00%
Belanja Modal Pengadaan Jalan	70.000.000	70.000.000	100,00%
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Kotor	140.500.000	140.500.000	100,00%

Kelurahan Sananwetan

Program/Kegiatan	Jumlah (Rp)		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
BELANJA LANGSUNG	1.753.916.755,00	1.743.613.975,00	99,41%
PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN	303.642.100,00	300.899.330,00	99,10%
Honorarium PNS	1.185.000	530.000	44,73%
Belanja Bahan Paki Habis	38.769.200	38.769.200	100,00%
Belanja Jasa Kantor	47.780.000	46.439.230	97,19%
Belanja Cetak dan Penggandaan	15.621.500	15.621.500	100,00%
Belanja Makanan dan Minuman	22.876.000	22.876.000	100,00%
Belanja Jasa Kantor	1.575.000	1.575.000	100,00%
Belanja Bahan/Material	10.200.000	10.200.000	100,00%
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	11.785.800	11.188.800	94,93%
Belanja Pemeliharaan	102.552.000	102.402.000	99,85%
Belanja Barang Non Kapitalisasi	6.595.000	6.595.000	100,00%
Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	2.528.900	2.528.900	100,00%
Belanja Modal Pengadaan Komputer	30.000.000	30.000.000	100,00%
Belanja Modal Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	12.173.700	12.173.700	100,00%
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DAERAH	12.041.000,00	12.041.000,00	100,00%
Belanja Jasa Kantor	2.000.000	2.000.000	100,00%
Belanja Makanan dan Minuman	1.444.000	1.444.000	100,00%
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	8.597.000	8.597.000	100,00%
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	2.767.800,00	2.767.800,00	100,00%
Belanja Cetak dan Penggandaan	2.159.800	2.159.800	100,00%

Belanja Makanan dan Minuman	608.000	608.000	100,00%
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN DAN KELURAHAN	123.208.500,00	122.903.500,00	99,75%
Honorarium PNS	265.000	260.000	98,11%
Belanja Bahan Pakai Habis	7.274.500	7.274.500	100,00%
Belanja Jasa Kantor	77.649.600	77.349.600	99,61%
Belanja Cetak dan Penggandaan	15.162.400	15.162.400	100,00%
Belanja Makanan dan Minuman	11.857.000	11.857.000	100,00%
Belanja Jasa Konsultasi	10.000.000	10.000.000	100,00%
Jasa Tenaga Ahli dan Narasumber	1.000.000	1.000.000	100,00%
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN	1.312.257.355,00	1.305.002.345,00	99,45%
Honorarium PNS	800.000	700.000	87,50%
Belanja Bahan Pakai Habis	26.106.095	26.079.045	99,90%
Belanja Bahan/Material	142.050.000	142.050.000	100,00%
Belanja Jasa Kantor	365.885.960	362.885.800	99,18%
Belanja Cetak dan Penggandaan	6.673.600	6.673.600	100,00%
Belanja Makanan dan Minuman	235.448.900	235.448.900	100,00%
Belanja Jasa Tenaga Ahli dan Narasumber	2.500.000	2.500.000	100,00%
Belanja sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.466.800	5.466.800	100,00%
Belanja Pakaian Kerja	7.500.000	7.500.000	100,00%
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	33.000.000	33.000.000	100,00%
Belanja Pemeliharaan	1.000.000	1.000.000	100,00%
Belanja Barang/Jasa selain Hibah dan Bantuan Sosial yang diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	162.696.600	162.693.800	100,00%
Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	2.600.000	2.600.000	100,00%
Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	15.829.400	15.829.400	100,00%
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat kerja	153.200.000	149.075.000	97,31%

Belanja Modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	19.000.000	19.000.000	100,00%
Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	5.000.000	5.000.000	100,00%
Belanja Modal Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	7.500.000	7.500.000	100,00%
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Menara	120.000.000	120.000.000	100,00%

Kelurahan Karangtengah

Program/Kegiatan	Jumlah (Rp)		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
BELANJA LANGSUNG	1.255.372.545,00	1.203.181.534,00	95,84%
PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN	256.053.500,00	246.995.359,00	96,46%
Honorarium PNS	2.270.000	530.000	23,35%
Belanja Bahan Paki Habis	30.991.950	30.591.950	98,71%
Belanja Jasa Kantor	51.590.950	46.172.809	89,50%
Belanja Cetak dan Penggandaan	19.885.000	19.885.000	100,00%
Belanja Makanan dan Minuman	32.270.800	32.270.800	100,00%
Belanja Bahan/Material	10.800.000	10.800.000,00	100,00%
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.017.000	4.467.000,00	89,04%
Belanja sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	12.651.500	12.651.500,00	
Belanja Pemeliharaan	36.532.800	35.582.800,00	97,40%
Belanja Modal Pengadaan Alat Bantu	7.452.500	7.452.500,00	100,00%
Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	18.900.000	18.900.000,00	100,00%
Belanja Modal Pengadaan Komputer	27.691.000	27.691.000,00	100,00%
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DAERAH	15.932.600,00	15.697.600,00	98,53%
Honorarium PNS	325.000,00	90.000,00	27,69%
Belanja Jasa Kantor	3.017.600	3.017.600	100,00%
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	12.590.000	12.590.000	100,00%
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	306.075,00	306.075,00	100,00%
Belanja Cetak dan Penggandaan	116.375	116.375	100,00%
Belanja Makanan dan Minuman			100,00%

	189.700	189.700	
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN DAN KELURAHAN	71.194.000,00	50.266.900,00	70,61%
Honorarium PNS	175.000	170.000	97,14%
Belanja Jasa Kantor	54.898.800	34.098.800	62,11%
Belanja Cetak dan Penggandaan	853.100	853.100	100,00%
Belanja Makanan dan Minuman	5.267.100	5.145.000	97,68%
Belanja Jasa Konsultasi Penelitian/Research/Survey	10.000.000	10.000.000	100,00%
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN	911.886.370,00	889.915.600,00	97,59%
Honorarium PNS	1.090.000	780.000	71,56%
Belanja Bahan Pakai Habis	2.125.000	2.070.000	97,41%
Belanja Bahan/Material	64.134.870	64.134.800	100,00%
Belanja Jasa Kantor	207.545.400	202.568.900	97,60%
Belanja Cetak dan Penggandaan	5.480.600	5.480.600	100,00%
Belanja Makanan dan Minuman	164.263.500	153.136.500	93,23%
Belanja Jasa Tenaga Ahli dan Narasumber	7.450.000	5.200.000	69,80%
Belanja Pakaian Kerja	22.115.000	22.115.000	100,00%
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	64.350.000	64.350.000	100,00%
Belanja Pemeliharaan	46.800.000	46.800.000	100,00%
Belanja Barang/Jasa selain Hibah dan Bantuan Sosial yang diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	170.532.000	170.279.800	99,85%
Belanja Modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	15.000.000	15.000.000	100,00%
Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	5.000.000	5.000.000	100,00%
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	27.000.000	24.000.000	88,89%
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Menara	44.000.000	44.000.000	100,00%
Belanja Modal Pengadaan Jalan	40.000.000	40.000.000	100,00%
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi	25.000.000	25.000.000	100,00%

Kelurahan Plosokerep

Program/Kegiatan	Jumlah (Rp)		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
BELANJA LANGSUNG	1.345.553.315,00	1.318.783.778,00	98,01%
PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN	463.181.300,00	455.551.478,00	98,35%
Honorarium PNS	350.000,00	170.000,00	48,57%
Belanja Bahan Paki Habis	18.501.600	18.488.660	99,93%
Belanja Jasa Kantor	38.280.000	32.102.618	83,86%
Belanja Cetak dan Penggandaan	8.592.400	8.592.400	100,00%
Belanja Makanan dan Minuman	7.104.400	7.104.400	100,00%
Belanja Bahan/Material	9.300.000	9.300.000	
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	9.184.500	8.211.000	89,40%
Belanja Pemeliharaan	23.426.800	23.426.800	100,00%
Belanja Modal Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	25.000.000	25.000.000	100,00%
Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	49.201.300	49.021.300	
Belanja Modal Pengadaan Komputer	56.939.500	56.929.500	99,98%
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	5.053.800	5.053.800	100,00%
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat kerja	204.247.000	204.151.000	99,95%
Belanja Modal Pengadaan Jaringan Listrik dan Penerangan Jalan/Taman	8.000.000	8.000.000	100,00%
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DAERAH	10.262.500,00	10.262.500,00	100,00%
Belanja Jasa Kantor	2.000.000	2.000.000	100,00%
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	8.262.500	8.262.500	100,00%
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	2.100.000,00	2.100.000,00	100,00%
Belanja Cetak dan Penggandaan	580.000	580.000	100,00%
Belanja Makanan dan Minuman	1.520.000	1.520.000	100,00%
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN DAN KELURAHAN	44.342.115,00	33.342.100,00	75,19%
Belanja Bahan Pakai Habis	1.992.815	1.992.800	100,00%

Belanja Jasa Kantor	30.400.000	19.400.000	63,82%
Belanja Cetak dan Penggandaan	3.949.300	3.949.300	100,00%
Belanja Jasa Konsultasi	8.000.000	8.000.000	100,00%
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN	825.667.400,00	817.527.700,00	99,01%
Honorarium PNS	350.000	340.000	97,14%
Belanja Bahan Pakai Habis	14.058.300	13.079.200	93,04%
Belanja Bahan/Material	58.300.000	58.300.000	100,00%
Belanja Jasa Kantor	141.015.600	137.796.800	97,72%
Belanja Cetak dan Penggandaan	8.034.200	7.490.400	93,23%
Belanja Makanan dan Minuman	139.456.300	136.568.300	97,93%
Belanja Pakaian Kerja	37.543.000	37.543.000	
Belanja Jasa Tenaga Ahli dan Narasumber	11.910.000	11.660.000	97,90%
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	22.750.000	22.750.000	100,00%
Uang untuk diberikan kepada masyarakat	5.250.000	5.250.000	100,00%
Belanja Barang/Jasa selain Hibah dan Bantuan Sosial yang diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	230.500.000	230.250.000	99,89%
Belanja Modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	23.000.000	23.000.000	100,00%
Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	5.000.000	5.000.000	100,00%
Belanja Modal Alat Keamanan dan Perlindungan	7.500.000	7.500.000	100,00%
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat kerja	16.000.000	16.000.000	100,00%
Belanja Modal Pengadaan Jalan	70.000.000	70.000.000	100,00%
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Kotor	35.000.000	35.000.000	100,00%

Kelurahan Klampok

Program/Kegiatan	Jumlah (Rp)		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
BELANJA LANGSUNG	1.148.220.004,00	1.152.703.534,00	100,39%
PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN	230.089.200,00	228.149.234,00	99,16%

Honorarium PNS	280.000	-	0,00%
Belanja Bahan Paki Habis	18.005.900	18.005.900	100,00%
Belanja Jasa Kantor	39.180.000	37.528.534	95,78%
Belanja Cetak dan Penggandaan	7.010.200	7.010.200	100,00%
Belanja Makanan dan Minuman	14.720.000	14.720.000	100,00%
Belanja Bahan/Material	8.565.000	8.565.000	100,00%
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.232.400	4.223.900	99,80%
Belanja Pemeliharaan	33.997.200	33.997.200	100,00%
Belanja Barang Non Kapitalisasi	3.644.000	3.644.000	100,00%
Belanja Modal Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	25.000.000	25.000.000	100,00%
Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	6.069.100	6.069.100	100,00%
Belanja Modal Pengadaan Komputer	40.945.400	40.945.400	100,00%
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	28.440.000	28.440.000	100,00%
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DAERAH	10.200.000,00	10.200.000,00	100%
Belanja Jasa Kantor	2.000.000	2.000.000	100%
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	8.200.000	8.200.000	100%
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	1.501.600,00	1.501.600,00	100%
Belanja Cetak dan Penggandaan	817.600	817.600	100%
Belanja Makanan dan Minuman	684.000	684.000	100%
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN DAN KELURAHAN	43.087.700,00	36.487.700,00	84,68%
Belanja Jasa Kantor	33.200.000	26.600.000	80,12%
Belanja Cetak dan Penggandaan	2.387.700	2.387.700	100,00%
Belanja Jasa Konsultasi	7.500.000	7.500.000	100,00%
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN	863.341.504,00	876.365.000,00	101,51%
Honorarium PNS	625.000	-	0,00%

Belanja Bahan Pakai Habis	9.978.100	9.978.100	100,00%
Belanja Bahan/Material	18.473.800	20.473.800	110,83%
Belanja Jasa Kantor	155.513.704	154.919.200	99,62%
Belanja Cetak dan Penggandaan	4.635.600	4.635.600	100,00%
Belanja Makanan dan Minuman	204.357.400	202.080.400	98,89%
Belanja Jasa Tenaga Ahli dan Narasumber	2.650.000	2.650.000	100,00%
Belanja sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	16.347.800	16.347.800	100,00%
Belanja Pakaian Kerja	68.085.000	84.005.000	123,38%
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	15.750.000	15.750.000	100,00%
Uang untuk diberikan kepada masyarakat	7.500.000	7.500.000	100,00%
Belanja Barang/Jasa selain Hibah dan Bantuan Sosial yang diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	216.600.000	212.800.000	98,25%
Belanja Modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	16.000.000	16.000.000	100,00%
Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	5.000.000	5.000.000	100,00%
Belanja Modal Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	7.500.000	7.500.000	100,00%
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	19.200.000	21.600.000	112,50%
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Menara	30.000.000	30.000.000	100,00%
Belanja Modal Pengadaan jalan	50.000.000	50.000.000	100,00%
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Kotor	15.125.100	15.125.100	100,00%

Kelurahan Rembang

Program/Kegiatan	Jumlah (Rp)		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
BELANJA LANGSUNG	1.203.607.885,00	1.164.291.898,00	96,73%
PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN	305.293.180,00	298.402.498,00	97,74%
Belanja Bahan Paki Habis	16.661.780	16.660.900	99,99%
Belanja Jasa Kantor	43.268.500	37.874.598	87,53%
Belanja Cetak dan Penggandaan	11.661.200	11.660.700	100,00%

Belanja Makanan dan Minuman	7.504.000	7.314.000	97,47%
Belanja Jasa Kantor	900.000	900.000	100,00%
Belanja Bahan/Material	10.152.000	10.152.000	100,00%
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	9.756.200	8.475.800	86,88%
Belanja Pemeliharaan	44.195.600	44.195.600	100,00%
Belanja Modal Pengadaan peralatan/Perengkapan Kantor	5.575.800	5.575.800	
Belanja Modal Pengadaan Komputer	30.525.000	30.515.000	99,97%
Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	68.798.300	68.788.300	99,99%
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	6.850.000	6.850.000	
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	49.444.800	49.439.800	99,99%
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DAERAH	8.182.600,00	8.180.000,00	99,97%
Belanja Pakaian Kerja	2.182.600	2.180.000	99,88%
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6.000.000	6.000.000	100,00%
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	2.156.175,00	2.155.500,00	99,97%
Belanja Cetak dan Penggandaan	636.175	635.500	99,89%
Belanja Makanan dan Minuman	1.520.000	1.520.000	100,00%
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN DAN KELURAHAN	40.453.490,00	30.273.200,00	74,83%
Belanja Jasa Kantor	27.608.800	17.808.800	64,50%
Belanja Cetak dan Penggandaan	1.664.690	1.284.400	77,16%
Belanja Makanan dan Minuman	2.280.000	2.280.000	100,00%
Belanja Jasa Konsultasi	8.500.000	8.500.000	100,00%
Belanja Jasa Tenaga Ahli dan Narasumber	400.000	400.000	100,00%
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN	847.522.440,00	825.280.700,00	97,38%
Honorarium PNS	1.780.000	-	0,00%
Belanja Bahan Pakai Habis	12.268.000	12.224.100	99,64%

Belanja Bahan/Material	132.456.000	135.456.000	102,26%
Belanja Jasa Kantor	95.466.800	95.208.000	99,73%
Belanja Cetak dan Penggandaan	1.673.200	1.491.200	89,12%
Belanja Makanan dan Minuman	248.394.640	229.217.600	92,28%
Belanja Jasa Tenaga Ahli dan Narasumber	4.000.000	4.000.000	100,00%
Belanja sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.345.400	3.345.400	100,00%
Belanja Pakaian Kerja	21.951.600	21.951.600	100,00%
Uang untuk diberikan kepada masyarakat	7.500.000	7.500.000	100,00%
Belanja Barang/Jasa selain Hibah dan Bantuan Sosial yang diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	230.856.000	227.056.000	98,35%
Belanja Modal Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	7.500.000	7.500.000	100,00%
Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	5.000.000	5.000.000	100,00%
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	75.330.800	75.330.800	100,00%

1. Alokasi Per Sasaran Pembangunan

Tabel III.6 Alokasi Per Sasaran Pembangunan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Anggaran	% Anggaran
1	2	3	4
Meningkatnya kualitas pelayanan publik di bidang pelayanan Kecamatan Sananwetan	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Sananwetan	824.701.345,00	6,20
Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan untuk kepuasan masyarakat	Persentase masyarakat yang puas terhadap pelayanan Kecamatan Sananwetan		
Meningkatnya koordinasi di bidang pemerintahan dan pembangunan di wilayah	Persentase jumlah koordinasi di bidang pemerintahan / keamanan / ketertiban/kesejahteraan sosial / pembangunan di wilayah yang ditindaklanjuti	8.912.700.202,00	67,10
JUMLAH		9.737.401.547,00	84,90%

2. Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Dalam melaksanakan kegiatan tahun 2020 Kecamatan Sananwetan Kota Blitar didukung dengan anggaran sebesar Rp 20.862.853.527,00 dengan total belanja tidak langsung sebesar Rp 7.574.355.485,00 dan belanja langsung sebesar Rp 13.288.498.042,00 dengan realisasi anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 19.696.931.128,14 atau 94,41% dengan rincian belanja langsung sebagai berikut :

Tabel III.7 Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Tujuan/Sasaran/Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Tujuan :							
Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pelayanan Kecamatan Sananwetan	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Sananwetan	Baik	Baik	100%	824.701.345,00	762.578.719,80	93%
Sasaran 1 :							
Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan untuk kepuasan masyarakat	Persentase masyarakat yang puas terhadap pelayanan Kecamatan Sananwetan	95%	95%	100%			
Program 1.1 :							
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	Persentase pelayanan tepat waktu	95%	95%	100%	824.701.345,00	762.578.719,80	93%
Sasaran 2 :							
Meningkatnya koordinasi di bidang pemerintahan dan pembangunan di wilayah	Persentase jumlah koordinasi di bidang pemerintahan/keamanan/ketertiban/kesejahteraan sosial/pembangunan di wilayah yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	8.912.700.202,00	8.782.943.678,54	99%
Program 1.2 :							
Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan dan Pembangunan	Persentase pembinaan di bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban kesejahteraan sosial, Pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di wilayah yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	8.912.700.202,00	8.782.943.678,54	99%

Tabel III.8
Realisasi Anggaran Tahun 2020

Uraian Program/Kegiatan (1)	Anggaran (Rp) (2)	Realisasi (Rp) (3)	% (4)	Permasalahan (5)	Solusi (6)
PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN	3.402.185.648	3.313.051.705	97,38%	Belum terintegrasinya pelayanan kecamatan dan kelurahan berbasis IT	Up grade aplikasi pelayanan
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DAERAH	121.089.000	120.743.600	99,71%	Belum optimalnya kompetensi petugas pelayanan	Adanya peningkatan kapasitas petugas pelayanan
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	27.821.650	27.679.575	99,49%	Belum optimalnya koordinasi pembangunan Infrastruktur kewilayahannya	Peningkatan koordinasi dalam bidang pembangunan infrastruktur kewilayahannya
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN DAN KELURAHAN	824.701.345	762.578.720	92,47%	Belum optimalnya pemberdayaan kelompok masyarakat di kecamatan	Peningkatan koordinasi dalam bidang pemberdayaan kelompok masyarakat di kecamatan
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN	8.912.700.399	8.782.943.679	98,54%	Belum optimalnya pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial di level kelurahan	Peningkatan koordinasi pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial di level kelurahan

3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel III.9 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

N O	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	% CAPAIAN KINERJA	%PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	Meningkatkan kualitas pelayanan publik dibidang pelayanan Kecamatan Sananwetan	Survey Kepuasan Masyarakat(SKM) Kecamatan Sananwetan	100%	93%	1,075
2	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan untuk kepuasan masyarakat	Persentase masyarakat yang puas terhadap pelayanan Kecamatan Sananwetan	100%		
3	Meningkatnya koordinasi di bidang pemerintahan dan pembangunan di wilayah	Persentase jumlah koordinasi di bidang pemerintahan/keamanan/ketertiban/kesjahteraan sosial/pembangunan di wilayah yang ditindaklanjuti	100%	99%	1,01

Keterangan tingkat efisiensi :

≥ 1 : efisien

< 1 : tidak efisien

Analisis Efisiensi penggunaan sumber daya :

- Sasaran Strategis 1** : Dari tabel diatas menunjukkan bahwa untuk sasaran "**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Untuk Kepuasan Masyarakat**" Tingkat Efisiensi kinerja dibanding penyerapan sebesar 1,075 dan dapat dikatakan telah efisien karena untuk mencapai kinerja sebesar 100% dilaksanakan dengan anggaran sebesar 95%
- Sasaran Strategis 2** : Dari tabel diatas menunjukkan bahwa untuk sasaran "**Meningkatnya Koordinasi di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan di Wilayah**" Tingkat Efisiensi kinerja dibanding penyerapan sebesar 1,010 dan dapat dikatakan telah efisien karena untuk mencapai kinerja sebesar 100% dilaksanakan dengan anggaran sebesar 99%

C. PRESTASI/PENGHARGAAN

Dalam kurun waktu tahun 2020 Kecamatan Sananwetan telah mendapatkan prestasi/ penghargaan dan prestasi yang diraih meliputi bidang pembangunan dan kemasyarakatan. Penghargaan dan prestasi yang diraih adalah sebagai berikut:

1. Hasil Evaluasi SAKIP pada Kecamatan Sananwetan Kota Blitar Tahun 2020 memperoleh Kategori A (memuaskan)
2. Peringkat I Tingkat Kota Blitar penerimaan PBB-P2 Tahun 2020
3. Juara 1 Lomba Kelurahan KB emas Tingkat Kota Blitar
4. Juara 1 Sensus Penduduk Online Tahun 2020
5. RW 06 Kelurahan plosokerep sebagai Lokasi Program Kampung Iklim Kategori Utama
6. Juara 1 Lomba Virtual PHBS Masyarakat

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari analisis hasil pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja dapat disimpulkan bahwa secara umum Kecamatan Sananwetan Kota Blitar pada Tahun 2020 mampu merealisasikan sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan dengan sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari realisasi capaian dua indikator kinerja utama Kecamatan Sananwetan Tahun 2020 sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Berikut uraian target dan realisasi capaian kinerja untuk setiap sasaran:

1. Tujuan :

Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pelayanan Kecamatan Sananwetan. Dengan target “BAIK” dan terealisasi dengan nilai “BAIK” (81,37). Sehingga pencapaiannya sebesar 100%.

2. Sasaran I

Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan untuk kepuasan masyarakat.

Target : 95%

Realisasi : 95%

3. Sasaran II

Meningkatnya koordinasi di bidang pemerintahan dan pembangunan di wilayah.

Target : 100%

Realisasi : 100%

Hasil dari analisis pengukuran kinerja ini dapat digunakan sebagai pijakan penentuan kebijakan berikutnya untuk tetap konsisten dalam jalur pewujudan **Good Governance**.

B. LANGKAH PERBAIKAN

Langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan oleh Kecamatan Sananwetan berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Langkah perbaikan yang dilakukan:

- a. Meningkatkan sarana dan prasarana yang menunjang kepuasan masyarakat penerima layanan kecamatan/ kelurahan, seperti penyediaan ruang laktasi, ruang tunggu yang dilengkapi tempat bermain

anak, penyediaan fasilitas pelayanan yang bersahabat dengan penyandang disabilitas, penyediaan bahan bacaan, serta nomor antrian.

b. Meningkatkan kualitas dan kapasitas petugas pelayanan sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

2. Mengoptimalkan koordinasi bidang pemerintahan dan pembangunan di wilayah.

Langkah perbaikan:

a. Meningkatkan kerja sama dengan OPD lain.

b. Membangun jejaring komunikasi yang efektif baik internal dan eksternal yang dapat menjamin ketepatan dan kecepatan aliran informasi.

Demikian beberapa hal yang dapat disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Sananwetan Kota Blitar tahun 2020, semoga dapat memberikan informasi yang jelas akan capaian kinerja Kecamatan Sananwetan Kota Blitar. Mengingat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) akan dipergunakan secara terus menerus dan saling terkait dalam system informasi dan system manajemen instansi pemerintah, maka diharapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang disusun oleh Kecamatan Sananwetan Kota Blitar akan mendapat masukan positif dan konstruktif dari berbagai pihak yang terkait sehingga dapat dijadikan acuan perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan keberkahan dan kasih sayang-NYA sehingga kita memiliki kekuatan dan kemampuan untuk bersama-sama membangun Kota Blitar dengan tulus ikhlas dalam rangka mewujudkan visi dan misi daerah menuju peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Kota Blitar.

Blitar, 31 Januari 2021
CAMAT SANANWETAN

HERU EKO PRAMONO, S.STP.
Pembina Tk. I
NIP. 19750409 199602 1 002

**MATRIK RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN SANANMETAN KOTA BLITAR
TAHUN 2016 - 2021**

VISI KOTA BLITAR : "WASARAWATI KOTA BLITAR SEMAKIN SEJAHTERA MELALUI APBD PRO RAKYAT PADA TAHUN 2021"
MISI KE 6 : MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH, DAN PROFESIONAL.

REALISASI	INDIKATOR	KOMPONEN	TUJUAN					SARAN					CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SARAN	KETERANGAN					
			KONDISI AWAL					PANGRE											
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2015	2016	2017			2018	2019	2020	2021	
Meningkatkan kualitas pelayanan publik dibidang pelayanan kecamatan	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan	Rutme SKM	NA	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk kepuasan masyarakat	Meningkatkan kualitas pelayanan publik di kecamatan	Program peningkatan kualitas pelayanan masyarakat, pemertintahan dan pemantauan	
			NA	NA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Meningkatkan koordinasi jumlah yang di bidang ditindaklanjuti/ dan pemertintah jumlah seluruh an/keasans koordinasi an/keasjah 100%	Meningkatkan jumlah koordinasi yang ditindaklanjuti/ dan pemertintah jumlah seluruh an/keasans koordinasi an/keasjah 100%	Program peningkatan kualitas pelayanan masyarakat, pemertintahan dan pemantauan		



**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN SANANWETAN KOTA BLITAR**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HERU EKO PRAMONO, S.STP.**
Jabatan : **CAMAT SANANWETAN KOTA BLITAR**
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr.Ir.,JUMADI, M.MT**
Jabatan : **Pjs. WALIKOTA BLITAR**
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Dr. Ir. JUMADI, M.MT

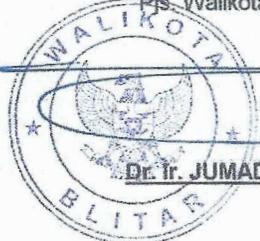
Blitar, 23 Oktober 2020
Pihak Pertama,

HERU EKO PRAMONO, S.STP.
Pembina Tingkat I
NIP. 19750409 199602 1 002

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KECAMATAN SANANWETAN KOTA BLITAR**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di bidang pelayanan Kecamatan Sananwetan	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Sananwetan	Baik
2	Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan untuk kepuasan masyarakat	Persentase masyarakat yang puas terhadap pelayanan Kecamatan Sananwetan	95%
3	Meningkatnya koordinasi di bidang pemerintahan dan pembangunan di wilayah	Persentase jumlah koordinasi di bidang pemerintahan/keamanan/ketertiban/kesejahteraan sosial/ pembangunan di wilayah yang ditindaklanjuti	100%
4	Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat	Persentase pelayanan tepat waktu	95%
5	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat, pemerintahan dan pembangunan	Persentase pembinaan di bidang Pemerintahan, Keamanan dan ketertiban, kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di wilayah yang ditindaklanjuti	100%

PROGRAM	ANGGARAN
1. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN DAN KELURAHAN	Rp 824.701.345,00
2. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN	Rp 8.912.700.202,00
3. PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN	Rp 3.402.185.648,00
4. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DAERAH	Rp 121.089.000,00
5. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Rp 27.821.650,00
JUMLAH	Rp 13.288.497.845,00

Pjs. Walikota Blitar

Dr. Ir. JUMADI, M.MT

Blitar, 23 Oktober 2020
 Camat Sananwetan

HERLEKO PRAMONO, S.STP.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19750409 199602 1 002

**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT
KECAMATAN SANANWETAN KOTA BLITAR**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SISWANTORO**
Jabatan : **SEKRETARIS KECAMATAN SANANWETAN**
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **HERU EKO PRAMONO, S.STP.**
Jabatan : **CAMAT SANANWETAN**
Selaku atasan langsung pihak pertama
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,


HERU EKO PRAMONO, S.STP.
Pembina Tingkat I
NIP. 19750409 199602 1 002

Blitar, 23 Oktober 2020
PIHAK PERTAMA,


SISWANTORO
Pembina
NIP. 19690601 199202 1 001

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
SEKRETARIS
KECAMATAN SANANWETAN KOTA BLITAR**

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terlaksananya Pelayanan Perkantoran	Persentase kecukupan pelayanan perkantoran	100%
2	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Perangkat Daerah	Tingkat partisipasi perangkat daerah dalam agenda kota	100%
3	Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan perangkat daerah tersusun tepat waktu dan sesuai aturan	100%

No	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KET
1	Program Pelayanan Perkantoran	Rp 1.375.990.148,00	
2	Program Peningkatan Kapasitas Perangkat Daerah	Rp 43.823.200,00	
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp 17.245.000,00	
JUMLAH		Rp 1.437.058.348,00	

CAMAT SANANWETAN
KOTA BLITAR


HERU EKO PRAMONO, S.STP.
Pembina Tingkat I
NIP. 19750409 199602 1 002

Blitar, 23 Oktober 2020
SEKRETARIS KECAMATAN
SANANWETAN
KOTA BLITAR


SISWANTORO
Pembina
NIP. 19690601 199202 1 001

**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN
KECAMATAN SANANWETAN KOTA BLITAR**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **FATIMATUL NIKMAH, S.E.**
Jabatan : **KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN**
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **HERU EKO PRAMONO, S.STP.**
Jabatan : **CAMAT SANANWETAN**
Selaku atasan langsung pihak pertama
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,



HERU EKO PRAMONO, S.STP.
Pembina Tingkat I
NIP. 19750409 199602 1 002

Blitar, 23 Oktober 2020
PIHAK PERTAMA,



FATIMATUL NIKMAH, S.E.
Penata
NIP. 19761122 199602 2 002

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN
KECAMATAN SANANWETAN KOTA BLITAR**

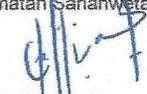
NO	KINERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan	Jumlah dokumen laporan monitoring dan evaluasi ADK	1 buku
		Jumlah lembaga/organisasi kemasyarakatan kelurahan yang difasilitasi	5 lembaga
		Jumlah lokasi kerja bakti dan Prokasih	7 lokasi
		Jumlah peserta lomba membuat keterampilan dari bahan bekas dan lomba pkk	0 orang
		Jumlah peserta musrenbang RKPD tingkat kecamatan	150 orang
		Jumlah peserta Pembinaan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan	660 orang
		Jumlah dokumen profil yang tersusun	1 dokumen

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KET.
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN		
1	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan	Rp 1.456.725.700,00	
	TOTAL	Rp 1.456.725.700,00	

Camat Sananwetan


HERU EKO PRAMONO, S.STP.
Pembina Tingkat I
NIP. 19750409 199602 1 002

Blitar, 23 Oktober 2020
Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan
Kecamatan Sananwetan


FATIMATUL NIKMAH, S.E.
Penata
NIP. 19761122 199602 2 002

**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
SEKSI PELAYANAN UMUM
KECAMATAN SANANWETAN KOTA BLITAR**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **KITAMAH LESTARI, SE**
Jabatan : **KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM KECAMATAN SANANWETAN**
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **HERU EKO PRAMONO, S.STP.**
Jabatan : **CAMAT SANANWETAN**
Selaku atasan langsung pihak pertama
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

Blitar, 23 Oktober 2020
PIHAK PERTAMA,


HERU EKO PRAMONO, S.STP.
Pembina Tingkat I
NIP. 19750409 199602 1 002


KITAMAH LESTARI, SE
Penata Tk.I
NIP. 19710118 199803 2 005

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
SEKSI PELAYANAN UMUM
KECAMATAN SANANWETAN KOTA BLITAR**

NO	KINERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kecamatan	Jumlah pelayanan masyarakat yang difasilitasi	13 pelayanan
		Jumlah P3N/modin nikah yang terfasilitasi	10 orang
		Jumlah dokumen SKM yang tersusun	1 dokumen
		Jumlah dokumen monografi yang tersusun	2 dokumen
		Jumlah peserta pembinaan pelayanan kecamatan	120 orang
		Jumlah peserta lomba pelayanan	7 kelurahan

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KET.
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN DAN KELURAHAN			
1	Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kecamatan/Kelurahan	Rp 317.468.020,00	
	TOTAL	Rp 317.468.020,00	

Camat Sananwetan



HERU EKO PRAMONO, S.STP.
Pembina Tingkat I
NIP. 19750409 199602 1 002

Blitar, 23 Oktober 2020
Kasi Pelayanan Umum
Kecamatan Sananwetan



KITAMAH LESTARI, SE
Penata Tk.I
NIP. 19710118 199803 2 005

**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
SUB BAGIAN UMUM, KEUANGAN DAN PENATAUSAHAAN BARANG
KECAMATAN SANANWETAN KOTA BLITAR**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ULFA NURUL LAILI, S.Ag**
Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN UMUM, KEUANGAN DAN PENATAUSAHAAN BARANG**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **SISWANTORO**
Jabatan : **SEKRETARIS KECAMATAN SANANWETAN**
Selaku atasan langsung pihak pertama
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

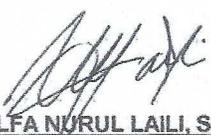
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,


SISWANTORO
Pembina
NIP. 19690601 199202 1 001

Blitar, 23 Oktober 2020
PIHAK PERTAMA,


ULFA NURUL LAILI, S.Ag
Penata
NIP. 19790222 200901 2 003

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
SUB BAGIAN UMUM, KEUANGAN DAN PENATAUSAHAAN BARANG
KECAMATAN SANANWETAN KOTA BLITAR**

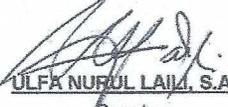
NO	KINERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Perkantoran	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	42 macam
		Jumlah barang cetakan yang tersedia	5 cetakan
		Jumlah lembar penggandaan	20.650 lembar
		Jumlah bahan bacaan yang tersedia	4 bahan bacaan
		Jumlah dos/kotak makanan dan minuman yang tersedia	2.070 dos
2	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti	11 rakor
3	Terlaksananya Penyediaan Jasa Perkantoran	Jumlah tenaga pelayanan perkantoran yang tersedia	8 orang
		Jumlah iuran kebersihan yang terbayarkan	12 iuran
4	Tersusunnya Perencanaan, Pengelolaan dan Pelaporan Sarana Prasarana Perkantoran	Jumlah rekening yang terbayarkan	3 rekening
		Jumlah kendaraan dinas yang terbayarkan pajaknya	9 unit
		Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	17 komponen
		Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia	28 peralatan
		Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi	5 perlengkapan
		Jumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhi	9 peralatan
		Jumlah perlengkapan bangunan kantor yang terpelihara	2 perlengkapan
		Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	5 peralatan
		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	9 unit
		Jumlah bangunan kantor yang terbangun	1 gedung
		Jumlah meubelair yang terpelihara	10 meubelair
		Jumlah bangunan bukan gedung yang terbangun	2 bangunan

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KET.
PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN			
1	Pengelolaan Administrasi Perkantoran	Rp 100.539.700,00	
2	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah	Rp 55.817.500,00	
3	Penyediaan Jasa Perkantoran	Rp 276.070.313,00	
4	Penyusunan Perencanaan, Pengelolaan dan Pelaporan Sarana Prasarana Perkantoran	Rp 943.562.635,00	
TOTAL		Rp 1.375.990.148,00	

Sekretaris Kecamatan Sananwetan


SISWANTORO
 Pembina
 NIP. 19690601 199202 1 001

Blitar, 23 Oktober 2020
 Kasubag. Umum, Keuangan & Penatausahaan Barang
 Kecamatan Sananwetan


ULFA NURUL LAILI, S.Ag
 Penata
 NIP. 19790222 200901 2 003

**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEPEGAWAIAN
KECAMATAN SANANWETAN KOTA BLITAR**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **EVA KARTIKASARI, SE**
Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEPEGAWAIAN**
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **SISWANTORO**
Jabatan : **SEKRETARIS KECAMATAN SANANWETAN**
Selaku atasan langsung pihak pertama
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

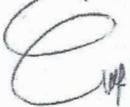
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,


SISWANTORO
Pembina
NIP. 19690601 199202 1 001

Blitar, 23 Oktober 2020
PIHAK PERTAMA,


EVA KARTIKASARI, SE
Penata
NIP. 19830906 201001 2 009

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEPEGAWAIAN
KECAMATAN SANANWETAN KOTA BLITAR**

NO	KINERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Tertindakannya Pengelolaan Administrasi dan Kelengkapan Kepegawaian	Jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti	1 even
2	Tertindakannya pengelolaan publikasi dan informasi Perangkat Daerah	Jumlah publikasi program/kegiatan perangkat daerah	1 publikasi
3	Tertindakannya dan tertaporkannya Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pelaporan yang tertusun Jumlah dokumen SKM yang tertusun	7 dokumen 1 dokumen

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KET.
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DAERAH			
1	Pengelolaan Administrasi dan Kelengkapan Kepegawaian	Rp 40.368.800,00	
2	Pengelolaan publikasi dan informasi Perangkat Daerah	Rp 3.454.400,00	
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN			
1	Penyusunan dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Rp 17.245.000,00	
TOTAL		Rp 61.068.200,00	

Sekretaris Kecamatan Sananwetan


SISWANTORO
 Pembina
 NIP. 19690601 199202 1 001

Blitar, 23 Oktober 2020
Kasubag, Program dan Kepegawaian
Kecamatan Sananwetan


EVA KARTIKASARI, SE
 Penata
 NIP. 19830906 201001 2 009

**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
SEKSI PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
KECAMATAN SANANWETAN KOTA BLITAR**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

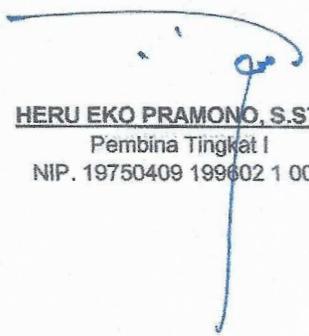
Nama : **ULFA NURUL LAILI, S.Ag**
Jabatan : **Pit. KASI PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **HERU EKO PRAMONO, S.STP.**
Jabatan : **CAMAT SANANWETAN**
Selaku atasan langsung pihak pertama
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

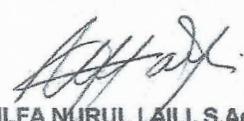
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,


HERU EKO PRAMONO, S.STP.
Pembina Tingkat I
NIP. 19750409 199602 1 002

Blitar, 23 Oktober 2020
PIHAK PERTAMA,


ULFA NURUL LAILI, S.Ag
Penata
NIP. 19790222 200901 2 003

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
SEKSI PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
KECAMATAN SANANWETAN KOTA BLITAR**

NO	KINERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya Pengembangan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah peserta musyawarah kecamatan dalam penanggulangan kemiskinan	300 orang
		Jumlah peserta lomba keolahragaan	0 tim
		Jumlah lembaga/organisasi kemasyarakatan yang difasilitasi	4 lembaga
		Jumlah kelompok yang mengikuti pameran	0 kelompok
		Jumlah tradisi lokal yang diselenggarakan	0 orang
		Jumlah Peserta Pembinaan Ekonomi dan Kesra	1 even

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KET.
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN		
1	Pengembangan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Rp 120.457.797	
	TOTAL	Rp 120.457.797	

Camat Sananwetan

HERU EKO PRAMONO, S.STP.
Pembina Tingkat I
NIP. 19750409 199602 1 002

Blitar, 23 Oktober 2020
Pit.Kasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
Kecamatan Sananwetan

ULFA NURUL LAKI S.Ag
Penata
NIP. 19790222 200901 2 003

**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
SEKSI PEMERINTAHAN DAN TRANTIBUM
KECAMATAN SANANWETAN KOTA BLITAR**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **JUNDI GUNTUR UTAMA**
Jabatan : **KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN DAN TRANTIBUM**
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **HERU EKO PRAMONO, S.STP.**
Jabatan : **CAMAT SANANWETAN**
Selaku atasan langsung pihak pertama
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,


HERU EKO PRAMONO, S.STP.
Pembina Tingkat I
NIP. 19750409 199602 1 002

Blitar, 23 Oktober 2020
PIHAK PERTAMA,


JUNDI GUNTUR UTAMA
Penata
NIP. 19641109 199502 1 001

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
SEKSI PEMERINTAHAN DAN TRANTIBUM
KECAMATAN SANANWETAN KOTA BLITAR**

NO	KINERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah wajib pajak membayar PBB	18.652 WP
		Jumlah peserta lelang bengkok	270 Orang
		Jumlah peserta sosialisai	150 Orang
		Jumlah patroli keamanan wilayah	50 patroli
		Jumlah Peserta pembinaan pemerintahan ketentraman dan ketertiban umum	860 orang
		Jumlah peserta lomba baris berbaris	0 orang
		Jumlah peserta lomba Cerdas Cermat	0 orang
		Jumlah orang yang difasilitasi Dapur Umum Penyelenggaraan Pemilihan Umum	40 orang
		Jumlah TPS difasilitasi	100 TPS
		Jumlah lembaga/organisasi	3 lembaga
		Jumlah petugas piket yang difasilitasi	6 orang
		Jumlah Orang yang difasilitasi posko covid	15 orang
		Jumlah Peserta sosialisasi Pemilu	300 orang

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KET.
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN		
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 440.194.400	
	TOTAL	Rp 440.194.400	

Camat Sananwetan


HERU EKO PRAMONO, S.STP.
Pembina Tingkat I
NIP. 19750409 199602 1 002

Blitar, 23 Oktober 2020
Kasi Pemerintahan dan Trantibum
Kecamatan Sananwetan


JUNDI GUNTUR UTAMA
Penata
NIP. 19641109 199502 1 001

**RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
KECAMATAN SANANWETAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA TAHUN 2020												
Meningkatnya kualitas pelayanan publik di bidang pelayanan kecamatan	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan	BAIK												
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="4" style="text-align: center;">TARGET</th> </tr> <tr> <th style="width: 25%;">I</th> <th style="width: 25%;">II</th> <th style="width: 25%;">III</th> <th style="width: 25%;">IV</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">BAIK</td> </tr> </table>	TARGET				I	II	III	IV	-	-	-	BAIK
TARGET														
I	II	III	IV											
-	-	-	BAIK											

NO.	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT/KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	RP.
		I	II	III	IV				
1	Fasilitasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Umum	√	√	√	√	Persentase pelayanan tepat waktu = 95%	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	Penyelenggaraan Pelayanan Umum (Kecamatan/Kelurahan)	339.713.517
2	Lomba Pelayanan Publik			√		Jumlah lomba pelayanan publik yang diikuti/diselenggarakan dalam 1 tahun = 1 lomba			
3	Sosialisasi Pelayanan	√				Jumlah peserta Sosialisasi Pelayanan = 155 orang			
4	Fasilitasi Modin	√	√	√	√	Pembantu Pencatat nitah (P3N) yang terfasilitasi = 10 orang			
5	Peningkatan Kompetensi Petugas Pelayanan	√				Jumlah petugas pelayanan = 95 orang			
6	Penyusunan Monografi		√		√	Dokumen monografi yang tersusun = 2 buku			
7	Penyusunan SKM			√	√	Dokumen SKM yang tersusun = 1 buku			

1	Sosialisasi PBB		√			Jumlah Peserta Sosialisasi PBB-P2 150 org	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan dan Pembangunan	Penyelenggaraan Pemerintahan Ketentraman dan Kerenthan Umum	465.494.400
2	Intensifikasi Penerimaan PBB		√	√		Jumlah peserta kegiatan Ledang 3 org, Penyisiran 8 org serta pelan panutan membayar PBB-P2 sebanyak 400 Org			
3	Evaluasi PBB		√	√		Jumlah peserta Rakor Evaluasi Realisasi Penerimaan PBB-P2 sebanyak 52 org			
4	Persiapan Persewaan Tanah Eks Bengkok				√	Jumlah peserta Rakor Penetapan calon Penyewa dan kisaran harga sewa tanah pertanian milik pemerintah tahun 2020 sebanyak 245 org			
5	Evaluasi Kelurahan Berhasil		√			Jumlah lomba kelurahan tingkat kecamatan dan tingkat kota = 1 lomba			
6	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilu	√	√			Jumlah peserta Sosialisasi sebanyak 300 org, Simulasi penghitungan suara sebanyak 1200 org dan Posko Dapur Umum pemilu 40 org			
7	Pembinaan Keamanan bagi Masyarakat		√			Jumlah peserta pembinaan keamanan masyarakat sebanyak 160 org			
8	Lomba PBB bagi Ilmias			√		Jumlah Lomba PBB Ilmias = 1 Lomba			
9	Penyuluhan Narkoba		√			Jumlah peserta Penyuluhan narkoba = 150 org			
10	Lomba Cerdas Cermat Poskamling			√		Jumlah Lomba Cerdas Cermat Poskamling = 1 Lomba			
11	Patroli dan Pengamanan Kegiatan	√	√	√	√	Jumlah patroli = 36 Patroli dan pengamanan kegiatan masyarakat = 12 Pengamanan			

1	Musrenbang RKPD	√	√	√	√	Jumlah Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan = 175 orang	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan	577.935.700
2	Pelestarian Lingkungan Hidup	√	√	√	√	Jumlah kerja bakti di 7 Kelurahan, Prokasi dan Fasilitas Kelurahan Berseri	Penyelenggaraan Pembangunan Masyarakat dan Pembangunan	
3	Fasilitasi PPMK dan ADK			√	√	Jumlah laporan dan monv PPMK = 2 dokumen		
4	Penyusunan Profil				√	Jumlah buku profil Kecamatan = 1 dokumen		
5	Pemberdayaan Lembaga							
	a. PKK	√	√	√	√	Jumlah peserta kegiatan Fasilitasi PKK Kecamatan = 70 orang		
	b. Rakor Bank Sampah			√		Jumlah Bank Sampah yg aktif = 11 BS		
	c. Fasilitasi Pentas SBGRM			√		Jumlah pentas SBGRM = 1 kali		
	d. Bingkisan Hari Raya		√			Jumlah penerima bingkisan hari raya bagi pengurus RT, RW dan LPMK = 990 orang		
	e. Lomba ketrampilan bahan bekas	√				Jumlah lomba membuat ketrampilan bahan bekas = 1 kali		

1	Turnamen Bola Volley	√	√			Jumlah peserta turnamen bola volley = 28 tim	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan	454.229.500
2	Pembinaan Remaja	√				Jumlah remaja yang mengikuti pembinaan = 75 orang		
3	Peringatan Isra' Mi'raj	√				Jumlah peserta turnamen Isra' Mi'raj = 75 orang		
4	Peringatan HAN	√				Peringatan HAN yang terfasilitasi = 1 kali		
5	Pembinaan Lansia		√	√		Jumlah lansia yang mendapat pembinaan = 75 orang		
6	Rakor Kota Sehat		√		√	Jumlah peserta Rakor Kota Sehat = 70 orang		
7	Pertemuan ODEJ		√		√	Jumlah peserta Pertemuan ODEJ = 100 orang		
8	Pagelaran wayang kulit		√		√	Jumlah Pagelaran wayang kulit = 1 kali dalam 1 tahun		
9	Bazar ekonomi kreatif		√			Jumlah kelompok yang mengikuti pameran = 24 kelompok		

Blitar, Januari 2020
 BEMERITA CAMAT SANANWETAN
 KECAMATAN SANANWETAN
 HERU EKO PRAMONO, S.STP
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19750409.199602.1.002

**MONEY RENCANA AKSI TRIWULAN I PENCAPAIAN KINERJA
KECAMATAN SANANWETAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

NO.	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT/KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	RP	REALISASI		HASIL EVALUASI	UPAYA TINDAK LANJUT
		I	II	III	IV					TW. I	ANGGARAN		
	KINERJA UTAMA												
	Indikatornya kualitas pelayanan publik di bidang pelayanan kecamatan												
	INDIKATOR KINERJA												
	TARGET KINERJA												
	TAHUN 2020												
	Baik												
	TARGET												
	TRIWULAN I												
	REALISASI												
	TRIWULAN I												
	SUDAH/BELUM												
	TRIWULAN I												
	FAKTOR PENDUKUNG/ PENGHAMBAT												
	Kurangnya jumlah petugas pelayanan umum												
	Kurangnya konsistensi mekanisme dan prosedur pelayanan di instansi terkait												
	Kegiatan Transmigrasi dan Pemerintahan lebih banyak mengacu ke kegiatan sosialisasi Pemtlu dan pembinaan keamanan yang tidak diperbolehkan saat musibah Covid 19												
	kegiatan dan realisasi anggaran Pengembangan Perumahan dan Kesejahteraan Rakyat dilaksanakan di akhir Tribulan I sehingga terhambat Covid-19												
	Menggeser kegiatan ke kegiatan penanggulangan Covid 19												
	Membuat target kegiatan yang masih bisa dilaksanakan saat pandemi Covid-19												
	REKOMENDASI/RENCANA PERBAIKAN												
	Tambah personil petugas pelayanan												
	Penetapan prosedur pelayanan yang konsisten untuk menjaga kualitas pelayanan												
	Membuat target kegiatan yang masih bisa dilaksanakan saat pandemi Covid-19												
1	Facilitasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Umum	V	V	V	V	Persentase pelayanan tepat waktu = 95%	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	penyelenggara Pelayanan Kelurahan	339.713.517	17%	56.363.596	Pemahaman proses pengadaan yang kurang sehingga menghambat pengadaan barang jasa seksi pelayanan	Koordinasi yang lebih intens dengan dinas terkait

2	Lomba Pelayanan Publik		√		Jumlah lomba pelayanan publik yang diikuti/disalenggarakan dalam 1 tahun = 1 lomba				0%			
3	Sosialisasi Pelayanan	√			Jumlah peserta Sosialisasi Pelayanan = 155 orang				100%		Penyampaian Informasi Pelayanan Publik	akan menambah peserta sosialisasi sebanyak 200 orang
4	Facilitasi Modin	√	√	√	Pembantu pencatat nilai (P3N) yang terfasilitasi = 10 orang				25%		Untuk memperlancar pelayanan perkawinan kepada masyarakat	PSW agar tetap terfasilitasi
5	Peringkat kompetensi Petugas Pelayanan	√			Jumlah petugas pelayanan = 95 orang				0%		Tidak dilaksanakan karena terhambat Covid-19	Pergeseran kegiatan ke penanggulangan dampak Covid-19
6	Penyusunan Monografi		√		Dokumen monografi yang tersusun = 2 buku				0%			
7	Penyusunan SKM		√	√	Dokumen SKM yang tersusun = 1 buku				0%			

1	Sosialisasi PBB		√		Jumlah Peserta Sosialisasi PBB-P2 150 org	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan dan Pembangunan	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelembagaan dan Keterlibatan Umum	455.494.400	6%	28.160.100			
2	Intensifikasi Pemerintahan PBB		√	√	Jumlah peserta kegiatan Ledang 3 org, Penyisiran 8 org serta pelepasan panutan membayar PBB-P2 sebanyak 400 Org				0%				
3	Evaluasi PAB		√	√	Jumlah peserta Rakor Evaluasi Realisasi Penelitiaan PBB-P2 sebanyak 52 org				0%				
4	Persiapan Persewaan Tanah Eks Bontok			√	Jumlah peserta Rakor Penetapan calon Penyewa dan Ksaran harga sewa tanah pertanian milik Pemerintah tahun 2020 sebanyak 245 org				0%				
5	Evaluasi Keturahan Berhasil		√		Jumlah lomba keturhan tingkat kecamatan dan tingkat kota = 1 lomba				0%				
6	Facilitasi Penyelenggaraan Pemilu	√	√		Jumlah peserta Sosialisasi sebanyak 300 org, Simulasi penghitungan suara sebanyak 1200 org dan Posko Dapur Umum pemilu 40 org				0%		Tidak dilaksanakan karena terhambat Covid-19	Pergeseran kegiatan ke penanggulangan dampak Covid-19	

7	Pembinaan keamanan bagi Masyarakat	√			Jumlah peserta pembinaan keamanan masyarakat sebanyak 160 org			100%	kestabilan/terdeteksi dini kondisi keamanan lingkungan	terciptanya masyarakat yang peka dan tanggap pada kondisi lingkungan sekitar
8	Lomba PBB bagi Limas		√		Jumlah Lomba PBB Limas = 1 Lomba			0%		
9	Penyuluhan Narkoba		√		Jumlah peserta Penyuluhan narkoba = 150 org			0%		
10	Lomba Cerdas Cermat Poskamling			√	Jumlah Lomba Cerdas Cermat Poskamling = 1 Lomba			0%		
11	Patroli dan Pengamanan Kegiatan	√	√	√	Jumlah patroli = 36 Patroli dan pengamanan kegiatan masyarakat = 12 Pengamanan			25,00%	terciptanya lingkungan yang aman tertanam dan kondusif	melaksanakan patroli di titik titik rawan kejadian tindak kriminal pada masing masing Kelurahan

1	Musrenbang RRPD	√			Jumlah Musrenbang RRPD Tingkat Kecamatan = 175 orang		577.935.700	25%	143.267.000	Pelaksanaan Musrenbang sesuai jadwal	Dilaksanakan desk dgn stakeholder agar hasil musrenbang lebih valid
2	Pelestarian Lingkungan Hidup	√	√	√	Jumlah kerja bakti di 7 Kelurahan, Prokash dan Fasilitasi Kelurahan Berseri			25%		Dilaksanakan sesuai jadwal	Memperluas cakupan kerja bakti di Kelurahan se kecamatan
3	Fasilitasi PPKK			√	Jumlah laporan dari monv PPMK = 2 dokumen			0%			
4	Penyusunan Profil			√	Jumlah buku profil Kecamatan = 1 dokumen			0%			
5	Pemberdayaan Lambaga			√	Jumlah peserta kegiatan Fasilitasi PPK Kecamatan = 70 orang			10%		seharusnya dilaksanakan minimal 1 kali per bulan karena terkendala Covid-19 pertemuan masih dilaksanakan 1 kali	Meminimalisir peserta pertemuan dan merjadwal ulang kegiatan pertemuan PPK
	a. PKK	√	√	√	Jumlah Bank Sampah yg aktif = 13 BS			0%			
	b. Rakor Bank Sampah			√	Jumlah Bank Sampah yg aktif = 13 BS			0%			
	c. Fasilitasi Pentas BBSGRM			√	Jumlah pentas BBSGRM = 1 kali			0%			
	d. Bimbingan Hari Raya		√		Jumlah penerima bimbingan hari raya bagi pengurus RT, RW dan LPMK = 990 orang			0%			
	e. Lomba ketrampilan bahan bekas	√			Jumlah lomba membuat ketrampilan bahan bekas = 1 kali			100%		Dilaksanakan sesuai jadwal	Memfasilitasi pelaksanaan ketrampilan bahan bekas

1	Turnamen Bola Volly	√				Jumlah peserta turnamen bola volly = 28 tim				454.229.500	1%	6.097.700	Tidak dilaksanakan karena terhambat Covid-19	Pengalihan kegiatan untuk penanggulangan Covid-19
2	Pembinaan Remaja	√				Jumlah remaja yang mengikuti pembinaan = 75 orang					0%		Terkendala Covid-19	Pengalihan kegiatan untuk penanggulangan Covid-19
3	Peringatan Isra' Mi'raj	√				Jumlah peserta turnamen Isra' Mi'raj = 75 orang					100%		Dilaksanakan sesuai jadwal	Menambah pengetahuan dan keaktifan
4	Peringatan HAN	√				Peringatan HAN yang terfallikasi = 1 kali					0%		Terkendala Covid-19	Pengalihan kegiatan untuk penanggulangan Covid-19
5	Pembinaan Lansia	√	√			Jumlah lansia yang mendapat pembinaan = 75 orang					0%			
6	Rakor Kota Sehat	√			√	Jumlah peserta Rakor Kota Sehat = 70 orang					0%			
7	Peremuan ODGJ	√			√	Jumlah peserta Peremuan ODGJ = 100 orang					0%			
8	Pagerian wayang kulit	√				Jumlah pagerian wayang kulit = 1 kali dalam 1 tahun					0%			
9	Baraz ekonomi kreatif	√				Jumlah kelompok yang mengikuti pameran = 24 kelompok					0%			

Blitar, April 2020
CAMAT SANANWETAN



**MONEV RENCANA AKSI TRIWULAN III PENCAPAIAN KINERJA
KECAMATAN SAMANWETAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA			SUDAH/BELUM	FAKTOR PENDUKUNG/ PENGHAMBAT	REKOMENDASI/RENCANA PERBAIKAN						
		TAHUN 2020	TRIWULAN III	TRIWULAN III				TRIWULAN III					
Meningkatnya kualitas pelayanan publik di bidang pelayanan kecamatan	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan	Baik	-	-	BELUM	<p>Kurangnya jumlah petugas pelayanan umum</p> <p>Kurangnya konsistensi mekanisme dan prosedur pelayanan di instansi terkait</p> <p>Kegiatan Tranlbum dan Pemerintahan lebih banyak mengacu ke kegiatan sosialisasi Pemilu dan pembinaan keamanan yang tidak diperbolehkan saat musibah Covid 19</p> <p>Kegiatan dan realisasi anggaran Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan masih terhambat terhambat Covid-19</p>	<p>Tambah personil petugas pelayanan</p> <p>Penetapan prosedur pelayanan yang konsisten untuk menjaga kualitas pelayanan</p> <p>Membuat target kegiatan yang masih bisa dilaksanakan saat pandemi Covid-19</p> <p>Membuat target kegiatan yang masih bisa dilaksanakan saat pandemi Covid-19</p>						
						<p>Kegiatan dan realisasi anggaran Pengembangan Perumahan dan Kesejahteraan Rakyat masih terhambat Covid-19</p>	<p>Menggeser kegiatan ke kegiatan penanggulangan Covid 19</p>						
NO.	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT/KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	RP	REALISASI		HASIL EVALUASI	UPAYA TINDAK LANJUT
		I	II	III	IV					TW. III	ANGGARAN		
I	Facilitasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Umum	√	√	√	√	Perentase pelayanan tepat waktu = 95%	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	Penyelenggara Pelayanan Umum Kecamatan /kelurahan	339.713.517	18%	61.319.304	Pemahaman proses pengadaan yang kurang sehingga menghambat pengadaan barang jasa seksi pelayanan	Koordinasi yang lebih intens dengan dinas terkait

2	Lomba Pelayanan Publik	V	V	Jumlah lomba pelayanan publik yang dikart/disenggarakan dalam 1 tahun = 1 lomba			0%	Anggaran direalisasikan	
3	Sosialisasi Pelayanan	V		Jumlah peserta Sosialisasi Pelayanan = 155 orang			0%		
4	Fastlasi Madiri	V	V	Pembantu Pencatat nihan (PAN) yang terfasilitasi = 10 orang			100%	Untuk memperlancar pelayanan perkawinan kepada masyarakat	P3N agar tetap terfasilitasi
5	Peningkatan kompetensi petugas Pelayanan	V		Jumlah petugas pelayanan = 95 orang			0%		
6	Penyusunan Monografi	V	V	Dokumen monografi yang tersusun = 2 buku			0%		
7	Penyusunan SKM	V	V	Dokumen SKM yang tersusun = 1 buku			0%	Akan dilaksanakan di triwulan IV	

1	Sosialisasi PBB	V		Jumlah Peserta Sosialisasi PBB- P2 150 org	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan dan Pembangunan	Penyelenggaraan Kelembagaan dan Keterbacaan Umum	465.494.400	6%	28.160.100	Telah dilaksanakan sesuai jadwal dengan tetap mematuhi protokol kesehatan	
2	Intensifikasi Pererinaan PBB	V	V	Jumlah peserta kegiatan leading 3 org, Penyisiran 8 org serta pekan pantuan membayar PBB- P2 sebanyak 400 org			100%			Telah dilaksanakan sesuai jadwal dengan tetap mematuhi protokol kesehatan	
3	Evaluasi PBB	V	V	Jumlah peserta Rakor Evaluasi Realisasi Pererinaan PBB-P2 sebanyak 52 org			0%				
4	Peristapan Persewaan Tanah Eks Bengkok		V	Jumlah peserta Rakor Penetapan calon Penyewa dan kisaran harga sewan tanah pertanian milik pemerintah tahun 2020 sebanyak 245 org			0%				
5	Evaluasi Kelurahan Berhasil	V		Jumlah lomba kelurahan tingkat kecamatan dan tingkat kota = 1 lomba			0%				
6	Fastlasi Penyelenggaraan Pemilu	V	V	Jumlah peserta Sosialisasi sebanyak 300 org, Simulasi penghitungan suara sebanyak 1200 org dan Posko Dapur Umum pemilu 40 org			0%				

**RENCANA KINERJA TAHUNAN 2020
KECAMATAN SANANWETAN**

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN					KET.
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Meningkatnya kualitas pelayanan publik di bidang pelayanan kecamaran	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	95%	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN DAN KELURAHAN	Presentase pelayanan tepat waktu	95%	Program peningkatan kualitas pelayanan kecamatan dan kelurahan	Persentase pelayanan tepat waktu	92%	884.081.242,00	Kecamatan Sananwetan	
						Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kecamatan/Kelurahan	Jumlah pelayanan masyarakat yang difasilitasi	13 pelayanan	339.273.517,00	Kecamatan Sananwetan	
							Jumlah peserta pembinaan pelayanan kecamatan	155 orang			
							Jumlah P3N/modin nikah yang terfasilitasi	10 orang			
							Jumlah dokumen SKM yang tersusun	1 dokumen			
							Jumlah peserta lomba pelayanan	7 kelurahan			
							Jumlah dokumen monografi yang tersusun	2 dokumen			
						Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kecamatan/Kelurahan	Jumlah pelayanan masyarakat yang difasilitasi	13 pelayanan	125.108.500,00	Kelurahan Sananwetan	
							Jumlah peserta nikah gratis yang terfasilitasi	85 pasang			
							Jumlah dokumen SKM yang tersusun	1 dokumen			
							Jumlah dokumen monografi yang tersusun	2 dokumen			
						Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kecamatan/Kelurahan	Jumlah pelayanan masyarakat yang difasilitasi	13 pelayanan	108.278.600,00	Kelurahan Gedog	
							Jumlah peserta pembinaan pelayanan umum	160 peserta			
							Jumlah peserta nikah gratis yang terfasilitasi	78 pasang			
							Jumlah dokumen SKM yang tersusun	1 dokumen			
							Jumlah dokumen monografi yang tersusun	2 dokumen			
						Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kecamatan/Kelurahan	Jumlah pelayanan masyarakat yang difasilitasi	13 pelayanan	44.492.290,00	Kelurahan Rembang	
							Jumlah peserta nikah gratis yang terfasilitasi	31 pasang			

PROGRAM	PENTINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase pembinaan di bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban, kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di wilayah yang ditindaklanjuti	100%	Program peningkatan kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat, pemerintahan dan pembangunan	Persentase pembinaan di bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban, kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di wilayah yang ditindaklanjuti	100%	8.595.925.712,00	Kecamatan Sananwetan
	Penyelenggaraan Pemerintahan Ketrantaman dan Ketertiban Umum			<p>Jumlah wajib pajak yang</p> <p>Jumlah peserta pembinaan pemerintahan ketrantaman dan ketertiban umum</p> <p>Jumlah peserta lelang bengkok</p> <p>Jumlah Patroli keamanan wilayah</p> <p>Jumlah peserta lomba Baris Berbaris</p> <p>Jumlah peserta lomba cerdas cermat</p> <p>Jumlah petugas piket yang difasilitasi</p> <p>Jumlah lembaga/ organisasi kemasyarakatan yang difasilitasi</p> <p>Jumlah orang yang difasilitasi Dapur Umum Penyelenggaraan Pemilhan Urum</p> <p>Jumlah Peserta Sosialisasi Peminu</p> <p>Jumlah TPS difasilitasi</p> <p>Jumlah peserta sosialisasi</p> <p>Jumlah Wajib pajak membayar pajak</p> <p>Jumlah Patroli keamanan lingkungan</p>	<p>18.652WP</p> <p>860 orang</p> <p>270 orang</p> <p>50 patroli</p> <p>70 orang</p> <p>70 orang</p> <p>4 orang</p> <p>3 lembaga</p> <p>40 orang</p> <p>300 orang</p> <p>100 TPS</p> <p>150 orang</p> <p>4.120 wajib pajak</p> <p>12 kali</p>	465.494.400,00	Kecamatan Sananwetan	
	Penyelenggaraan Pemerintahan Ketrantaman dan Ketertiban Umum				118.185.200,00	Kelurahan Sananwetan		

Penyelenggaraan Pemerintahan Ketentranaan dan Keterliban Umum	jumlah peserta sosialisasi penitlu	300 orang	93.101.170,00	Kelurahan Karangtengah
	Jumlah Wajib pajak membayar PBB	2.900 WP		
	Jumlah Patroli keamanan lingkungan	48 patroli		
	Jumlah tim cerdas cermat	10 orang		
	antar poskanning			
	Jumlah peserta lomba PBB	15 orang		
	Jumlah peserta forum keamanan dan keterliban masyarakat	60 orang		
	Jumlah orang yang difasilitasi dapur umum penyelenggaraan penitlu	25 orang		
	jumlah peserta sosialisasi penitlu	200 orang		
	jumlah peserta sosialisasi penitlu	300 orang		
Penyelenggaraan Pemerintahan Ketentranaan dan Keterliban Umum	Jumlah Wajib pajak membayar PBB-P2	3.045 WP	104.476.800,00	Kelurahan Bendogerit
	Jumlah Patroli keamanan wilayah	48 patroli		
	Jumlah tim cerdas cermat antar poskanning	10 orang		
	Jumlah TPS yang difasilitasi	18 TPS		
	Jumlah peserta lomba baris- berbaris	15 orang		
	Jumlah orang yang difasilitasi dapur umum penyelenggaraan penitlu	30 orang		
	jumlah peserta sosialisasi penitlu	300 orang		
	Jumlah Wajib pajak membayar PBB	1.730 WP		
	Jumlah Patroli keamanan lingkungan	48 patroli		
	Jumlah peserta lomba Baris- berbaris Linmas	15 orang		
Pengembangan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah orang yang difasilitasi dapur umum penyelenggaraan penitlu	25 orang	83.471.900,00	Kelurahan Plosokerep
	jumlah TPS yang difasilitasi penitlu	7TPS		
	jumlah peserta sosialisasi penitlu	300 orang		
Pengembangan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah peserta musyawarah Kecamatan dalam penanggulangan kemiskinan	310 orang	454.229.500,00	Kecamatan Sananwetan

Pengembangan Perkonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah kelompok yang mengikuti pameran	2 kelompok		
	Jumlah tradisi lokal yang diselenggarakan	1 even		
	Jumlah peserta pembinaan perkonomian dan kesejahteraan rakyat	14 orang		
	Jumlah tim lomba keolahragaan	12 tim		
	Jumlah lembaga/ organisasi kemasyarakatan yang difasilitasi	4 lembaga		
	Jumlah peserta musyawarah kelurahan dalam penanggulangan kemiskinan	100 orang	166.267.500,00	Kelurahan Klampok
	Jumlah kelompok yang mengikuti pameran	1 kelompok		
	Jumlah tradisi lokal yang diselenggarakan	3 Even		
	Jumlah peserta pembinaan perkonomian dan kesejahteraan rakyat	12 orang		
	Jumlah lembaga/ organisasi kemasyarakatan yang difasilitasi	4 lembaga		
Pengembangan Perkonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Tim lomba keolahragaan	16 tim		
	Jumlah peserta musyawarah kelurahan dalam penanggulangan kemiskinan	130 orang	143.883.800,00	Kelurahan Karangtengah
	Jumlah kelompok yang mengikuti pameran	1 kelompok		
	Jumlah tradisi lokal yang diselenggarakan	1 even		
	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	15 orang		
	Jumlah lembaga/ organisasi kemasyarakatan yang difasilitasi	5 lembaga		
	Jumlah peserta lomba keolahragaan	22 tim		
	Jumlah peserta musyawarah kelurahan dalam penanggulangan kemiskinan	130 orang	139.398.585,00	Kelurahan Bendogerit
	Jumlah peserta lomba keolahragaan	22 tim		

Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan (DAU TAMBAHAN)	Jumlah lembaga/ organisasi kemasyarakatan yang difasilitasi	3 lembaga	350.000.000,00	Keturahan Gedog
	Jumlah lokasi kerja bakti	8 lokasi		
	Jumlah peserta musrenbang RKPD tingkat kelurahan	1.471 orang		
	Jumlah dokumen profil yang tersusun	1 dokumen		
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan (DAU TAMBAHAN)	Jumlah lokasi pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana umum	1 lokasi	477.008.741,00	Keturahan Gedog
	Jumlah peserta pelatihan dan pemberdayaan masyarakat	414 peserta		
	Jumlah lokasi pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana umum	15 lokasi		
	Jumlah lembaga kemasyarakatan kelurahan yang difasilitasi	6 lembaga		
	Jumlah peserta lomba	30 orang		
	Jumlah lokasi yang difasilitasi	15 lokasi		
	Jumlah lokasi kerja bakti	15 lokasi		
	Jumlah peserta musrenbang RKPD tingkat kelurahan	2.160 orang		
	Jumlah dokumen profil yang tersusun	1 dokumen		
	Jumlah lokasi pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana umum	3 titik		
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan (DAU TAMBAHAN)	Jumlah peserta Pembinaan pemberdayaan Masyarakat dan pembangunan	130 orang	311.924.440,00	Keturahan Rembang
	Jumlah lembaga/kelompok masyarakat yang difasilitasi	4 lembaga		
	Jumlah lokasi pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana umum	1 lokasi		
	Jumlah lembaga kemasyarakatan kelurahan yang difasilitasi	4 lembaga		
	Jumlah lokasi kerja bakti	4 lokasi		
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan	Jumlah lokasi pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana umum	28 orang	760 orang	Keturahan Rembang
	Jumlah lokasi kerja bakti	4 lokasi		
	Jumlah peserta musrenbang RKPD tingkat kelurahan	28 orang		

	jumlah dokumen profil yang tersusun	1 dokumen		
	Jumlah lokasi pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana umum	2 Lokasi	350.000.000,00	
	Jumlah peserta pembinaan pembangunan masyarakat dan pembangunan	90 orang		
	Jumlah Lembaga/kelompok yang difasilitasi	3 lembaga		
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan	Jumlah lokasi pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana umum	4 lokasi	306.578.304,00	
	jumlah lembaga kemasyarakatan kelurahan yang difasilitasi	3 lembaga	Kelurahan Klampok	
	jumlah lokasi kerja bakti	8 lokasi		
	Jumlah Lomba kelurahan yang difasilitasi	2 lomba		
	Jumlah peserta lomba kebersihan lingkungan tk kelurahan	8 RW		
	jumlah peserta musrenbang RPPD tingkat kelurahan	1.220 orang		
	jumlah dokumen profil yang tersusun	1 dokumen		
	Jumlah Peserta Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan	125 orang		350.000.000,00
	Jumlah Lembaga Atau Kelompok Masyarakat Yang Difasilitasi	7 kelompok		
	Jumlah lokasi pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana umum	4 lokasi		
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan	Jumlah lokasi pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana umum	2 lokasi		333.038.900,00
	jumlah lembaga kemasyarakatan kelurahan yang difasilitasi	2 lembaga	Kelurahan Karangtengah	
	jumlah lokasi kerja bakti	5 lokasi		
	jumlah peserta musrenbang RPPD tingkat kelurahan	1.255 orang		
	jumlah dokumen profil yang tersusun	1 dokumen		

Penyelenggaraan Pembedayaan Masyarakat dan Pembangunan (Dan Tambahan)	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	100 orang	350.000.000,00	Kelurahan Bendogerit
	Jumlah Peserta yang mengikuti pembinaan	45 orang		
	Jumlah Lembaga/Kelompok Masyarakat yang difasilitasi	3 lembaga		
Penyelenggaraan Pembedayaan Masyarakat dan Pembangunan	Jumlah Lokasi Pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana umum	5 lokasi	484.930.651,00	Kelurahan Bendogerit
	Jumlah lokasi pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana umum	9 lokasi		
	jumlah lembaga kemasyarakatan Kelurahan yang difasilitasi	3 lembaga		
	Jumlah lokasi kerja bakti	9 lokasi		
	Jumlah peserta lomba lingkungan asri	11 RW		
	Jumlah peserta lomba makanan olahan	2 kelompok		
	jumlah peserta musrenbang RKPd tingkat Kelurahan	1.890 orang		
	jumlah dokumen profil yang tersusun	1 dokumen		
	Jumlah peserta pembinaan pembedayaan masyarakat dan pembangunan	65 orang		
	Jumlah lokasi pembangunan/pemeliharaan	7 lokasi		
Penyelenggaraan Pembedayaan Masyarakat dan Pembangunan	Jumlah lembaga yang difasilitasi masyarakat	4 lembaga	310.560.550,00	Kelurahan Plosokerep
	Jumlah lokasi pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana umum	6 lokasi		
	jumlah lembaga kemasyarakatan Kelurahan yang difasilitasi	4 lembaga		
	Jumlah lokasi kerja bakti lingkungan asri	8 lokasi		
	Jumlah peserta lomba tumpeng	8 tim		
	jumlah peserta musrenbang RKPd tingkat Kelurahan	1050 orang		

Program Pelayanan Perkantoran	Persentase kecukupan pelayanan perkantoran	100%	Program Pelayanan Perkantoran	jumlah dokumen profil yang tersusun Jumlah lokasi pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana umum Jumlah peserta pembinaan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan Jumlah lembaga/kelompok masyarakat yang difasilitasi	1 dokumen 3 lokasi 114 orang 3 lembaga	350.000.000,00 2.926.402.578,00	Kecamatan Sanawetan
Program Pelayanan Perkantoran	Persentase kecukupan pelayanan perkantoran	100%	Program Pelayanan Perkantoran	Persentase kecukupan pelayanan perkantoran Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia Jumlah barang cetakan yang tersedia Jumlah lembar penggandaan Jumlah bahan bacaan yang tersedia Jumlah dos/kotak makanan dan minuman yang tersedia Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia Jumlah barang cetakan yang tersedia Jumlah lembar penggandaan Jumlah bahan bacaan yang tersedia Jumlah dos/kotak makanan dan minuman yang tersedia Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia Jumlah barang cetakan yang tersedia Jumlah lembar penggandaan Jumlah bahan bacaan yang tersedia Jumlah dos/kotak makanan dan minuman yang tersedia Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	100% 40 macam 5 Cetak 21.037 lembar 4 bahan bacaan 2.328 dos 38 macam 4 cetakan 6.000 lembar 5 bahan bacaan 665 dos/ kotak 21 macam 4 cetakan 2690 lembar 4 bahan bacaan 1.075 dos 18 macam	100.787.900,00 80.846.850,00 39.294.400,00	Kecamatan Sanawetan Kelurahan Sanawetan Kelurahan Gedog
Program Pelayanan Perkantoran	Persentase kecukupan pelayanan perkantoran	100%	Program Pelayanan Perkantoran	Pengelolaan Administrasi Perkantoran	36.067.480,00	Kelurahan Rembang	

	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	2 bahan bacaan		
	Jumlah barang cetakan yang tersedia	4 cetakan		
	Jumlah lembar penggandaan	7.000 lembar		
	Jumlah dos/kotak makanan dan minuman yang tersedia	440 dos		
Pengelolaan Administrasi Perkantoran	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	20 macam	36.611.800,00	Kelurahan Klampok
	Jumlah barang cetakan yang tersedia	5 cetakan		
	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	2 bahan bacaan		
	Jumlah lembar penggandaan	5.000 lembar		
	Jumlah dos/kotak makanan dan minuman yang tersedia	500 dos		
Pengelolaan Administrasi Perkantoran	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	41 macam	69.668.550,00	Kelurahan Karangtengah
	Jumlah barang cetakan yang tersedia	8 macam		
	Jumlah lembar penggandaan	26.250 lembar		
	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	3 bahan bacaan		
	Jumlah porsi makanan dan minuman yang tersedia	858 dos dan 430 dos		
Pengelolaan Administrasi Perkantoran	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	30 macam	35.825.350,00	Kelurahan Bendogerit
	Jumlah barang cetakan yang tersedia	4 cetakan		
	Jumlah lembar penggandaan	10.000 lembar		
	Jumlah bahan bacaan yang tersedia,	2 bahan bacaan		
	Jumlah dos/kotak makanan dan minuman yang tersedia	420 dos/ kotak		
Pengelolaan Administrasi Perkantoran	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	24 macam	40.089.000,00	Kelurahan Plosokerep
	Jumlah barang cetakan yang tersedia	4 cetakan		
	Jumlah lembar penggandaan	9.758 lembar		
	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	3 bahan bacaan		
	Jumlah dos/kotak makanan dan minuman yang tersedia	868 dos		

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti	15 rakor	120.000.000,00	Kecamatan Sananwetan
Penyediaan Jasa Perkantoran	Jumlah tenaga pelayanan perkantoran yang tersedia	8 orang	296.310.267,00	Kecamatan Sananwetan
Penyediaan Jasa Perkantoran	Jumlah iuran kebersihan yang dibayarkan	12 iuran		
Penyediaan Jasa Perkantoran	Jumlah iuran kebersihan yang dibayarkan	1 iuran	1.575.000,00	Kelurahan Sananwetan
Penyediaan Jasa Perkantoran	Jumlah iuran kebersihan yang dibayarkan	1 iuran	960.000,00	Kelurahan Gedog
Penyediaan Jasa Perkantoran	Jumlah iuran kebersihan yang dibayarkan	1 iuran	900.000,00	Kelurahan Rembang
Penyediaan Jasa Perkantoran	Jumlah iuran kebersihan yang dibayarkan	1 iuran	900.000,00	Kelurahan Klampok
Penyediaan Jasa Perkantoran	Jumlah iuran kebersihan yang dibayarkan	1 iuran	0	Kelurahan Karangtengah
Penyediaan Jasa Perkantoran	Jumlah iuran kebersihan yang dibayarkan	1 iuran	960.000,00	Kelurahan Bendogerit
Penyediaan Jasa Perkantoran	Jumlah jasa kebersihan yang dibayarkan	1 iuran	1.260.000,00	Kelurahan Plosokerep
Penyusunan Perencanaan, Pengelolaan dan Pelaporan Sarana Prasarana Perkantoran	Jumlah rekening yang dibayarkan	3 rekening	728.140.181,00	Kecamatan Sananwetan
	Jumlah kendaraan dinas yang dibayarkan pajaknya	9 unit		
	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan	17 komponen		
	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia	27 peralatan		
	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi	5 perlengkapan		
	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhi	8 peralatan		
	Jumlah perlengkapan bangunan kantor yang terpelihara	8 perlengkapan		
	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	6 peralatan		
	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara	9 unit		
	Jumlah bangunan kantor yang terpelihara	5 gedung		

Penyusunan Perencanaan, Pengelolaan dan Pelaporan Sarana Prasarana Perkantoran	Jumlah jenis meubelair yang terpelihara	1 meubelair	212.400.750,00	Kelurahan Sananwetan
	Jumlah bangunan bukan gedung yang terbangun	2 bangunan		
	Jumlah rekening yang terbayarkan	5 rekening		
	Jumlah kendaraan dinas yang terbayarkan	6 unit		
	Jumlah jenis komponen terbayarkan	7 komponen		
	Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang tersedia	16 macam		
	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	11 macam		
	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	3 macam		
	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	3 macam		
	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara	6 unit		
	Jumlah bangunan kantor yang terpelihara	1 unit		
	Jumlah meubelair yang terpelihara	1 macam		
	Jumlah bangunan kantor yang terhab	1 unit		
Penyusunan Perencanaan, Pengelolaan dan Pelaporan Sarana Prasarana Perkantoran	Jumlah rekening yang terbayarkan	3 rekening	112.762.300,00	Kelurahan Gedog
	Jumlah kendaraan dinas yang terbayarkan	6 unit		
	Jumlah jenis komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia	9 komponen		
	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia	21 macam		
	Jumlah perlengkapan bangunan kantor yang terpelihara	8 macam		
	Jumlah peralatan kantor yang terpelihara	2 buah		
	Jumlah instalasi yang terpelihara	1 unit		
	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	3 macam		

	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	6 unit		
	Jumlah bangunan kantor yang terpelihara	1 unit		
	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	2 unit		
Penyusunan Perencanaan, Pengelolaan dan Pelaporan Sarana Prasarana Perkantoran	Jumlah rekening yang terbayarkan	3 rekening	194.677.200,00	Kelurahan Rembang
	Jumlah kendaraan dinas yang terbayarkan pejaknya	6 unit		
	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	6 komponen		
	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia	14 macam		
	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	3 macam		
	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	2 macam		
	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	6 unit		
	Jumlah bangunan kantor yang terpelihara	1 unit		
	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	4 unit		
	Jumlah meubelair yang terpelihara	1 jenis		
	Jumlah bangunan kantor yang terpelihara	1 jenis		
	Jumlah meubelair yang terpelihara	1 macam		
	Penyusunan Perencanaan, Pengelolaan dan Pelaporan Sarana	Jumlah rekening yang terbayarkan		
	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	11 macam		
	Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang tersedia	16 jenis		
	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang tersedia	4 jenis		

	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	4 jenis			
	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	6 unit			
	Jumlah meubelair yang terpelihara	2 jenis			
	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	1 gedung			
Penyusunan Perencanaan, Pengelolaan dan Pelaporan Sarana Prasarana Perkantoran	Jumlah rekening yang terbayarkan	3 rekening	172.501.150,00	Kelurahan Karangtengah	
	Jumlah kendaraan dinas yang terbayarkan pajaknya	7 unit			
	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	6 komponen			
	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia	14 macam			
	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi	1 macam			
	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhi	4 macam			
	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	1 macam			
	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	3 macam			
	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	7 unit			
	Jumlah bangunan kantor yang terpelihara	1 unit			
	Jumlah meubelair yang terpelihara	1 macam			
	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	1 unit			
	Jumlah rekening yang terbayarkan	3 rekening	156.462.400,00		Kelurahan Bendogerit
	Jumlah kendaraan dinas yang terbayarkan pajaknya	6 unit			
Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	7 komponen				
Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia	14 macam				

Program Peningkatan Kapasitas Perangkat Daerah	Tingkat partisipasi perangkat daerah dalam agenda kota	100%	Program Peningkatan Kapasitas Perangkat Daerah	Tingkat partisipasi perangkat daerah dalam agenda kota	100%	235.699.400,00	Kecamatan Sananwetan
			Jumlah penambahan daya listrik	2200 KWH	619.500,00	Kelurahan Sananwetan	
			Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah jenis dokumen laporan keuangan yang tersusun	5 dokumen	1.201.200,00	Kelurahan Gedog
			Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah jenis dokumen yang tersusun	5 dokumen	2.310.000,00	Kelurahan Rembang
			Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah jenis dokumen laporan keuangan yang tersusun	1 dokumen	2.065.200,00	Kelurahan Klatempok
			Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah jenis dokumen laporan keuangan yang tersusun	4 buku	1.289.000,00	Kelurahan Karangtengah
			Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah jenis dokumen laporan keuangan yang tersusun	5 dokumen	1.345.000,00	Kelurahan Bendogerit
			Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah jenis dokumen laporan keuangan yang tersusun	5 dokumen	1.050.000,00	Kelurahan Plosokerep
			Jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti	5 even	50.000.000,00	Kecamatan Sananwetan	
			Jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti	5 even	25.000.000,00	Kelurahan Sananwetan	
Jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti	5 even	25.000.000,00	Kelurahan Gedog				
Jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti	5 even	25.000.000,00	Kelurahan Rembang				
Jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti	4 even	25.000.000,00	Kelurahan Klatempok				
Jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti	5 even	25.000.000,00	Kelurahan Karangtengah				
Jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti	5 even	25.000.000,00	Kelurahan Bendogerit				

Pengelolaan Administrasi dan Kelengkapan Kepegawatan	Jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti	5 even	25.000.000,00	Kelurahan Plosokerep
Pengelolaan publikasi dan informasi Perangkat Daerah	Jumlah publikasi program/kegiatan perangkat	2 publikasi	10.699.400,00	Kecamatan Sananwetan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan OPD tersusun tepat waktu dan sesuai aturan	100%	20.576.650,00	Kecamatan Sananwetan
Perencanaan dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun	7 dokumen	10.000.000,00	Kecamatan Sananwetan
Perencanaan dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun	2 dokumen	2.767.800,00	Kelurahan Sananwetan
Perencanaan dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun	4 dokumen	400.000,00	Kelurahan Gedog
Perencanaan dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun	4 dokumen	2.156.175,00	Kelurahan Rembang
Perencanaan dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun	5 dokumen	1.501.600,00	Kelurahan Klampok
Perencanaan dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun	2 dokumen	306.075,00	Kelurahan Karangtengah
Perencanaan dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun	1 dokumen	1.345.000,00	Kelurahan Bendogerit
Perencanaan dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun	4 dokumen	2.100.000,00	Kelurahan Plosokerep
			12.662.685.582,00	


 31 Januari 2020
 HIERU EKO PRAMONO, S.STP
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19750409 199602 1 002

TANDA TERIMA

Telah terima Dokumen dari Kecamatan Sananwetan Kota Blitar :

Kepada : Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Blitar

Dokumen : Soffcopy dan Hardcopy Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKj IP) Kecamatan Sananwetan
Kota Blitar Tahun 2020

Blitar, 16 Maret 2021

Yang Mengirim


EVA KARTIKASARI

Yang Menerima


NIKEN NIULANSARI
